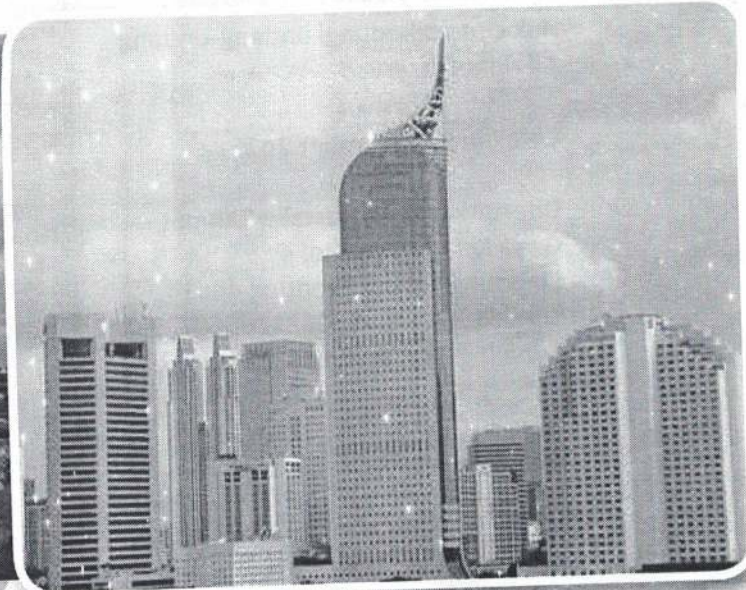


Dr. Ika Sartika, MT
Dra. Gatingsih, MT
Prof. Dr. H. Wirman Syafri Saliwa, M.Si

Teori Pembangunan Dan Implikasinya di Indonesia



Pustaka
Rahmat

Berkualitas dan Bermartabat

KATA PENGANTAR

Buku Teori Pembangunan dan Implikasinya di Indonesia, pembahasan teori pembangunan dan perkembangannya, berbagai strategi pembangunan di Indonesia sebagai implikasi dari perkembangan teori pembangunan yang berkembang di dunia, mulai dari negara-negara beraliran “kiri” sampai negara-negara beraliran “kanan”. Buku ini bisa digunakan oleh berbagai kalangan, seperti dosen, peneliti, mahasiswa, praktisi di bidang pembangunan, serta para pengambil kebijakan yang terkait dengan bidang pembangunan. Mudah-mudahan buku ini bisa dimanfaatkan sesuai harapan semua pihak.

Penulis sangat berterima kasih kepada Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang telah memberi kesempatan kepada semua dosen di lingkungan IPDN untuk menulis buku ajar yang relevan dengan mata kuliah yang ada di IPDN. Sehingga dapat menjadi acuan dan pedoman yang sangat bermanfaat bagi civitas akademika, kepada pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian buku ini, terima kasih penulis ucapkan, semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa

Akhirnya, segala kritik dan saran yang konstruktif akan penulis terima dengan senang hati untuk perbaikan buku ini.

Jatinangor, September 2015

Tim Penulis

Peta Teori Pembangunan	54
Perkembangan Teori Pembangunan	57
1. Teori modernisasi	57
2. Teori dependensi	59
3. Teori pasca ketergantungan	60
4. Teori Modernisasi	63
Pendahuluan.....	63
Teori Harrord-Domar: Tabungan dan Investasi.....	64
Max Weber: Etika Protestan	65
David McClelland: Dorongan Berprestasi atau n-Ach	66
W.W. Rostow: Lima Tahap Pembangunan	67
1. Masyarakat tradisional	67
2. Prakondisi untuk lepas landas	68
3. Lepas landas	68
4. Bergerak ke kedewasaan	68
5. Jaman konsumsi masal yang tinggi	69
Bert F. Hozelitz: Faktor-Faktor Non-ekonomi	69
1. Pemasokan modal besar dan perbankan	70
2. Pemasokan tenaga ahli dan terampil	70
Alex Inkeles dan David H. Smith: Manusia Modern.....	71
Implikasi Teori Modernisasi.....	71
1. Teori Harrord-Domar (Tabungan dan Investasi)	72
2. Teori W.W Rostow : Lima tahap pembangunan	72
5. Teori Struktural	73
Pendahuluan.....	73
Raul Prebisch: Industri Substitusi Impor	76
Perdebatan tentang Imperialisme dan Kolonialisme	80
1. Teori God	80
2. Teori Glory	81
3. Teori Gold	84
Paul Baran: Sentuhan yang Mematikan dan Kretinisme.....	88

Strategi Pembangunan Pemerintah Era Reformasi	164
Pengembangan Pulau-Pulau Besar	167
Pembangunan Wilayah Laut	168
Pengembangan Kawasan Strategis, Daerah Tertinggal, Perbatasan, Pembangunan Perkotaan, Perdesaan, Pertanahan, Tata Ruang ...	169
Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan	170
Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal	174
Strategi Pembangunan Daerah di Indonesia	175
Isu-isu Strategis	183
Langkah-langkah Memanfaatkan Keunggulan Komperatif	184
Langkah Strategis Mobilisasi	185
Langkah Strategis Investasi/Divestasi	185
Langkah Strategis Untuk Bertahan (Status Quo)	187
Faktor-faktor Kunci Keberhasilan (Critical Factor)	187
 Lampiran 1 : Tabel Perbandingan Antara Teori Modernisasi, Teori Dependensi, dan Teori Sistem Dunia	 189
 Lampiran 2 : Perbandingan Antara Teori Pembangunan Berkelan- jutan, Teori Pembangunan Manusia, dan Teori Neo Liberalisme...	 189
 Daftar Pustaka	 191
 Bio Data Penulis	 198

Bab 1

Pengertian dan Ruang Lingkup Pembangunan



Pendahuluan

Pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi. Banyak kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Oleh sebab itu dalam bab ini akan dibahas tentang berbagai kriteria untuk mengukur pembangunan, ciri-ciri pembangunan yang berhasil, unsur pokok pembangunan, nilai, serta tujuan inti pembangunan.

Hakekat dari pembangunan adalah perubahan ke arah kondisi yang lebih baik (Tjokroamidjojo dan Mustofadidjaja, 1992:3). Oleh karena itu kegiatan pembangunan harus dilakukan secara terarah dan terencana. Terarah berarti terdapat kejelasan langkah dan sasarannya, sedang terencana berarti jelas tujuan yang akan dicapai.

Meskipun pengertian pembangunan tidak pernah dapat memuaskan semua pihak, sebagaimana dikatakan Black (1991:1), "*Development is such term. It has no precise meaning, no generally accepted definition*", namun selaras dengan hakekat pembangunan di atas, maka pendapat Bryant & White (1987:21) yang mengartikan pembangunan sebagai "peningkatan kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya", bisa dijadikan

Oakley & Marsden (1985:10) mengatakan: "*development from below assumes that participation is not only an end itself but also a fundamental precondition for and a tool of any successful development strategy*". Oleh karena itu, diperlukan suatu wadah yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan partisipasi. Wadah partisipasi ini dapat berbentuk organisasi formal maupun non formal, untuk memudahkan komunikasi baik antara sesama anggota kelompok maupun antara kelompok dengan pemerintah.

Uphoff, et al (1979:33) mengatakan "...*organization could be potential vehicles for broadening the base of participation in community, for increasing the locality's access to development resources, and promoting technical change*". Sedangkan Oakley & Marsden (1985:28) menekankan perlunya kelompok ini, karena "*The creation of group able to diagnose and analyse their own problem, to decide upon collective action and to carry out such action to deal with these problems...*". Pentingnya kelompok-kelompok lokal ini dapat pula disimak dari pendapat Mickelwait (dalam Bryan & White, 1987:295-296) yang mengatakan:

(1) organisasi-organisasi lokal dapat membantu pengembangan suatu sistem komunikasi dua arah yang efektif untuk menyusun rancangan proyek, pemantauan dan evaluasi... (2) Organisasi lokal merupakan sarana untuk menggalakkan dan mengukuhkan perubahan-perubahan perilaku seperti adopsi praktek-praktek pertanian yang baru... (3) Di wilayah yang sistem penyaluran dan pemasarannya buruk, organisasi lokal mungkin dapat memudahkan pengadaan, integrasi, dan administrasi jasa-jasa tersebut... (4) Komitmen sumber daya petani dapat ditingkatkan dengan pengaturan-pengaturan agar resiko dapat ditanggung bersama, dengan melibatkan organisasi-organisasi lokal untuk memudahkan pengaturan ini dan menegatkan pelaksanaannya.

Telah berkembang semacam slogan bahwa pembangunan harus berakar kerakyatan. Perhatian pembangunan yang berpusat pada rakyat memang sedang menjadi perhatian dari para cendekiawan dan pengelola pembangunan. Istilah-istilah seperti "*people centered development*", kemudian "*development from within*", sangat sering muncul dalam strategi alternatif pembangunan.

for the people and with the people. It must express their desires, aspirations, and values”.

Alasan mengapa suatu program pembangunan harus dibentuk untuk dan bersama masyarakat juga dikemukakan oleh Korten (1983: 209) sebagai berikut:

Ultimately the people themselves must have some voice and making the final choice that will bear most directly on their lives and planning systems must be designed to be responsive to their voice not only because their involvement is essential to gaining their commitment, but also because they have relevant information which otherwise may be unavailable to planner.

Pentingnya kemampuan pelaksana dapat disimak dari pendapat Esmara (1983: 27) yang mengatakan:

Kegagalan yang kita lihat dalam upaya pembangunan dimana saja sering bukan karena kelemahan konsep, tetapi karena ketidakmampuan sistem pelaksanaan dalam menterjemahkan konsep tersebut ke dalam program operasional yang mantap.

Model pembangunan seperti: keterpaduan, keswadayaan, partisipatif, dan terdesentralisasi, pada akhirnya akan memberikan kekuasaan dan kewenangan (*empowerment*) kepada masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri (Korten, 1986 dan Bryan & White, 1987).

Selanjutnya Kast dan Rosenzweig (1970: 222) mengatakan bahwa “*ability depends upon both skill and knowledge*”. Sedangkan Thoah (1983:154) menyatakan “kemampuan merupakan salah satu unsur dari kesiapan, berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, latihan, dan pengalaman”.

Sementara itu Gant (1979: 232) menyebutkan bahwa:

The development administrator, the man who heads or plays a prominent managerial role in an agency conducting a development program, must therefore have the competence of the qualifications to perform well in external as well as internal administration.

Lebih lanjut Ades, mengklasifikasikan kemampuan ini menjadi:

- a. *Technical Skill* are understanding of, and proficiency in, a specific kind of activity; particularly one involving methods, processes, procedures, or techniques.
- b. *Conceptual Skill* involve ability to view company as whole which is much greater than the sum of its parts, they include recognizing how the various functions of the organizations depend upon each others and how changes in one part affect all the others.
- c. *Human Skill* are ability to work affectively as a group member and build cooperatively effort within team.

Serupa dengan pendapat di atas, Katz (dalam Reddin, 1970:120) membagi kemampuan dalam tiga bentuk, yaitu kemampuan teknis, kemampuan kemanusiaan, dan kemampuan konseptual. Selanjutnya ia mengatakan:

Technical skill is "an understanding of, and proficiency in, a specific kind of activity, particularly one involving methods, processes, procedures or techniques"... *Human skill* is "the ability to work effectively as a group member"... *Conceptual skill* is "the ability to see the enterprise as a whole".

Mengukur Pembangunan

Budiman (2000) dalam bukunya yang berjudul "Teori Pembangunan Dunia Ketiga" menjabarkan beberapa cara untuk mengukur pembangunan, yang terdiri atas:

- 1) kekayaan rata-rata,
- 2) pemerataan,
- 3) kualitas kehidupan,
- 4) kerusakan lingkungan, dan
- 5) keadilan sosial dan kesinambungan.

1) Kekayaan rata-rata

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti *pertumbuhan ekonomi*. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila

saja. Pemerataan ini secara sederhana diukur dengan melihat berapa persen dari PNB diraih oleh 40% penduduk termiskin, berapa persen oleh 40% penduduk golongan menengah, dan berapa persen oleh 20% penduduk terkaya. Kalau terjadi ketimpangan yang luar biasa, misalnya 20% penduduk terkaya meraih lebih dari 50% PNB, sedangkan sisanya dibagi di antara 80% penduduknya, ketimpangan antara orang-orang kaya dan miskin dianggap besar.

Dalam ilmu ekonomi, 40% penduduk termiskin menerima kurang dari 12%, ketimpangan yang ada dianggap *mencolok*, kalau 40% penduduk termiskin menerima antara 12% sampai 17%, ketimpangan dianggap *sedang*. Bila penerimaan golongan ini lebih dari 17%, ketimpangan dianggap *lumayan kecil*.

Cara lain untuk mengukur ketimpangan pembagian pendapatan masyarakat adalah dengan perhitungan *Indeks Gini*. Indeks ini diukur dalam angka 0 dan 1. Bila Indeks Gini sama dengan 1, terjadi ketimpangan yang maksimal, bila 0, ketimpangan tidak ada. Jadi, semakin kecil Indeks Gini, semakin kecil ketimpangan pembagian pendapatan dalam masyarakat.

Indeks Gini yang lebih besar dari 0,5 dianggap sebagai ukuran bagi kesenjangan pemerataan yang tinggi. Kesenjangan yang moderat dicerminkan bila Indeks Gini yang diperoleh berkisar antara 0,4 dan 0,5. Sedangkan Indeks Gini yang lebih kecil dari 0,4 dianggap sebagai ukuran bagi kesenjangan pemerataan yang kecil.

Bila pembangunan sebuah bangsa diukur dengan PNB/kapita dan tingkat ketimpangan pembagian pendapatannya, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih majemuk. Tidak saja kekayaan atau produktivitas bangsa tersebut yang dilihat, tetapi juga pemerataan kekayaannya. Tidak semua negara yang berhasil meningkatkan PNB/kapitanya, berhasil juga dalam pemerataan hasil-hasil pembangunannya. Demikian juga tidak semua negara yang masih rendah PNB/kapitanya menunjukkan ketimpangan yang tinggi dalam hal pemerataan.

Dengan demikian dapat dikatakan, bangsa atau negara yang berhasil melakukan pembangunan adalah mereka yang di samping tinggi produktivitasnya, penduduknya juga makmur dan sejahtera secara relatif merata.

Arab Saudi	12.700	40
India	253	42
Irak	3.020	48
1	2	3
Qatar	27.790	56
Tanzania	299	58
Zimbabwe	815	63
Brazil	2.214	72
Cina	304	75
Sri Lanka	302	82
Singapura	5.220	86
Taiwan	2.503	87
Costa Rica	1.476	89

Sumber: Budiman (2000)

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa ada “ketidaksesuaian” antara prestasi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kualitas kehidupan. Tentu saja, tolok ukur PQLI ini juga mengalami banyak kritik, antara lain karena sebenarnya masih banyak indikator yang bisa dimasukkan ke dalam indeks ini. Tetapi, untuk tujuan tulisan ini guna menunjukkan bahwa pembangunan bukan sekedar penambahan kekayaan material saja yang diukur secara makro, pengetahuan tentang adanya indeks seperti ini memang sangat membantu pengertian kita tentang kompleksitasnya konsep pembangunan.

4) Kerusakan lingkungan

Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya, dan merata pendapatan penduduknya, bisa saja berada dalam sebuah proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini, misalnya, karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas yang tinggi itu tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungannya. Lingkungannya semakin rusak. Sumber-sumber alamnya semakin terkuras, sementara kecepatan bagi alam untuk melakukan rehabilitasi lebih lambat daripada kecepatan perusakan sumber alam

terjadi kesenjangan yang terlalu mencolok antara orang-orang kaya dan miskin, masyarakat yang bersangkutan menjadi rawan secara politis. Orang-orang miskin itu cenderung untuk menolak status quo yang ada. Mereka ingin memperbaiki diri dengan mengubah keadaan. Oleh karena itu, bila konfigurasi kekuatan-kekuatan sosial memungkinkan (misalnya, terjadi pertentangan yang tajam antara kaya dan miskin, terjadi perpecahan di kalangan militer dan sebagian dari mereka mendukung kelompok yang mau mengubah keadaan, kelompok orang-orang miskin ini terorganisir secara relatif baik, dan sebagainya), akan terjadi gejolak politik yang bisa menghancurkan hasil *pembangunan* yang sudah dicapai.

Dengan demikian, seperti juga masalah kerusakan alam yang dapat mengganggu kesinambungan pembangunan, faktor keadilan sosial juga merupakan semacam *kerusakan* sosial yang bisa mengakibatkan dampak yang sama. Kerusakan sosial ini antara lain dapat diukur oleh Indeks Gini dan tingkat kualitas kehidupan fisik seperti yang dicerminkan oleh tolok ukur PQLI. Karena itu, dapat dirumuskan bahwa pembangunan yang berhasil mempunyai unsur-unsur seperti pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Unsur-unsur Pembangunan yang Berhasil

Demikianlah, konsep pembangunan menjadi semakin kompleks,

merasa aman, dan bebas dari rasa takut. Hanya manusia seperti inilah yang bisa menyelenggarakan pembangunan dan memecahkan masalah yang dijumpainya. Produktivitas dan distribusi hasil-hasil pembangunan yang digeluti oleh ilmu ekonomi hanya merupakan akibat dari pembangunan yang berhasil membangun manusia pembangun ini.

Untuk membentuk manusia semacam ini, pelbagai aspek harus dibicarakan. Diperlukan studi tentang psikologi kewiraswastaan: bagaimana kreativitas bisa terbentuk dan tumbuh dalam diri seorang individu? Dibutuhkan studi tentang kebudayaan: bagaimana nilai-nilai dalam masyarakat terbentuk dan tumbuh dalam suatu kelompok manusia? Apa peran agama? Kondisi politik yang bagaimana yang harus dikembangkan dalam sebuah masyarakat, supaya memungkinkan jiwa kewiraswastaan muncul dan mengembang?

Dalam pembahasan selanjutnya, para ahli ilmu sosial di bidang psikologi, sosiologi, politik, antropologi dan lainnya akan dilibatkan dalam membahas dan menyusun teori-teori pembangunan. Keterlibatan mereka merupakan reaksi terhadap teori pembangunan yang sampai saat ini masih didominasi oleh para ahli ekonomi.

Pembangunan, pada akhirnya, merupakan masalah yang harus didekati secara interdisipliner melalui berbagai disiplin ilmu.

Tiga Nilai Inti Pembangunan

Paling tidak ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan yang paling hakiki. Todaro (2000) menyebutkan ketiga komponen dasar tersebut adalah **kecukupan** (*sustainance*), **jati diri** (*self esteem*), serta **kebebasan** (*freedom*); ketiga hal inilah yang merupakan tujuan pokok yang harus digapai oleh setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan. Ketiganya berkaitan secara langsung dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling mendasar, yang terwujud dalam berbagai macam manifestasi (bentuk) di hampir semua masyarakat dan budaya sepanjang jaman.

kejutan dan kebingungan budaya di banyak negara berkembang. Kontak dengan masyarakat lain yang secara ekonomis atau teknologis lebih maju acapkali mengakibatkan definisi dan batasan mengenai baik buruk atau benar salah menjadi kabur. Ini dikarenakan kesejahteraan nasional muncul sebagai berhala baru. Kemakmuran material lambat laun dianggap sebagai suatu ukuran kelayakan yang universal, dan dinobatkan menjadi landasan penilaian atas segala sesuatu. Derasnya serbuan nilai-nilai Barat yang mengagungkan materi telah mengikis jati diri masyarakat di banyak negara berkembang. Banyak bangsa yang tiba-tiba saja merasa dirinya kecil atau tidak berarti hanya karena mereka tidak memiliki kemajuan ekonomi dan teknologi setinggi bangsa-bangsa lain. Selanjutnya, yang dianggap hebat adalah yang punya kemajuan ekonomi dan teknologi modern, sehingga masyarakat negara-negara Dunia Ketiga pun berlomba-lomba mengujarnya, dan tanpa disadari mereka telah kehilangan jati dirinya.

3) Kebebasan (*freedom*): kemampuan untuk memilih

Nilai universal yang ketiga dan terakhir yang harus terkandung dalam makna pembangunan adalah konsep kemerdekaan manusia. Kemerdekaan atau kebebasan di sini hendaknya diartikan secara luas sebagai kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materiil dalam kehidupan ini. Kebebasan di sini juga harus diartikan sebagai kebebasan terhadap ajaran-ajaran yang dogmatis. Kebebasan juga meliputi kemampuan individual atau masyarakat untuk memilih satu atau sebagian dari sekian banyak pilihan yang tersedia. Konsep kebebasan manusia juga melingkupi segenap komponen yang terkandung di dalam konsep kebebasan politik, termasuk keamanan diri pribadi, kepastian hukum, kemerdekaan berekspresi, partisipasi politik, dan persamaan kesempatan.

Tiga Tujuan Inti Pembangunan

Dapat dikatakan bahwa pembangunan merupakan satu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin – melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional

Bab 2

Struktur Perekonomian Negara Negara Dunia Ketiga



Pendahuluan

Istilah “Dunia Ketiga” memang sudah agak ketinggalan zaman, terutama setelah perang dingin antara Dunia Pertama (blok kapitalis) dan Dunia Kedua (blok sosialis) berakhir. Dunia Ketiga adalah negara-negara yang tidak masuk ke dalam kedua blok tersebut, tetapi dalam perkembangannya, istilah Dunia Ketiga lebih diartikan sebagai negara-negara yang secara ekonomi masih miskin, atau negara-negara yang sedang berkembang, tanpa melihat ideologinya. Dalam bab ini akan dijelaskan struktur perekonomian negara-negara Dunia Ketiga yang tentunya sangat berbeda dengan negara-negara maju. Pemahaman ini diperlukan untuk melihat perkembangan teori-teori pembangunan selanjutnya.

Klasifikasi Negara-negara Berkembang

Sejumlah analisis, dalam upayanya untuk menyusun klasifikasi negara-negara berkembang berdasarkan sistem klasifikasi negara-negara berkembang berdasarkan sistem klasifikasi baku yang telah disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, mencoba membagi semua negara berkembang menjadi tiga buah golongan besar, yakni:

Index-HDI). Indeks ini merangking 174 negara ke dalam tiga kelompok pembangunan manusia, yaitu kategori “tinggi” (64 negara, termasuk di dalamnya beberapa negara sedang berkembang), “medium” (65 negara), dan “rendah” (45 negara).

Lalu ada pula sistem klasifikasi yang disusun oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) atau kelompok-kelompok negara-negara industri paling maju di dunia ini, yang bermarkas di Paris. OECD membagi negara-negara Dunia Ketiga (termasuk yang bukan atau belum menjadi anggota PBB) menjadi empat kelompok besar. Kelompok pertama terdiri dari 61 negara berpenghasilan rendah (LICs, *low-income countries*), yakni negara-negara yang pendapatan nasionalnya kurang dari US\$650 per tahun. Termasuk pula dalam kelompok pertama ini, dua puluh sembilan negara terbelakang (LLDCs, *least-developed countries*). Kelompok kedua adalah 73 negara berpenghasilan menengah (MICs, *middle-income countries*). Kelompok yang ketiga adalah 11 negara industri baru (NICs, *newly industrializing countries*). Sedangkan kelompok keempat adalah 13 negara pengekspor minyak anggota OPEC.

Struktur Perekonomian Negara-negara Dunia Ketiga

Setiap penggambaran diversitas atau keragaman negara-negara berkembang membutuhkan pemahaman atas delapan komponen dalam struktur perekonomian mereka. Adapun kedelapan komponen pokok tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) ukuran dan tingkat pendapatan,
- 2) latar belakang sejarah,
- 3) karunia sumber daya fisik dan manusia,
- 4) komposisi etnik dan agama,
- 5) arti penting relatif sektor pemerintah dan swasta,
- 6) struktur industri,
- 7) ketergantungan eksternal: ekonomi, politik, dan kultural
- 8) struktur politik, kekuasaan, dan kelompok kepentingan

kolonial Eropa Barat, bukan hanya Inggris dan Perancis, tetapi juga Belgia, Belanda, Jerman, Portugal, dan Spanyol. Selanjutnya, struktur perekonomian, pendidikan, dan lembaga-lembaga sosial yang ada di negara-negara jajahan tersebut biasanya dibentuk oleh bekas negara penjajahnya. Tentu saja pertimbangan utamanya adalah kepentingan si penjajah sendiri, bukannya negara-negara berkembang yang terjajah. Sebagai akibatnya, struktur wilayah kolonial biasanya tidak sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan khas dari negara-negara berkembang itu sendiri. Sebagai contoh, negara-negara di Afrika yang baru saja memperoleh kemerdekaannya harus menyisihkan waktu dan usaha yang begitu besar hanya untuk menangani masalah-masalah konsolidasi dan mengembangkan apa yang diwariskan oleh penjajah secara bertahap untuk memupuk perekonomian nasional serta struktur politik mereka sendiri. Konsekuensinya, mereka tidak sempat memberi perhatian yang memadai untuk mengupayakan pertumbuhan ekonomi secara cepat. Selama ini kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan lebih bersifat politis, yang antara lain dilakukan dalam rangka menyembuhkan luka-luka akibat penjajahan (sebagai salah satu contohnya adalah program "Afrikanisasi" secara cepat terhadap keseluruhan jajaran pegawai pemerintah, sipil, maupun militer, di banyak negara Afrika).

Barangkali yang lebih penting lagi adalah bahwasanya kekuatan-kekuatan kolonial Eropa telah meninggalkan dampak abadi yang begitu dramatis terhadap struktur perekonomian dan politik atau institusional di bekas daerah-daerah jajahannya di Afrika dan Asia. Hal ini terjadi melalui pengenalan tiga gagasan yang kemudian terbukti menimbulkan pengaruh yang begitu luas dan kuat, yaitu: kepemilikan pribadi, pajak perseorangan, dan keharusan bahwa pajak itu harus dibayar dengan uang, bukannya dengan barang atau sesuatu yang lain.

Negara-negara Amerika Latin, karena memiliki sejarah kemerdekaan politik yang lebih lama serta warisan penjajahan yang lebih seragam (karena semua negara di Amerika Latin tersebut dahulu sama-sama dijajah Spanyol dan Portugal), maka walaupun terpisah secara geografis dan demografis, mereka memiliki banyak persamaan ciri ekonomi, sosial, serta institusional budayanya. Cakupan masalah yang

melakukan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan negara yang terkurung oleh kepulauan. Negara-negara beriklim sedang dapat melakukan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tropis.

Sesungguhnya, yang termasuk sumber daya manusia, tidak hanya jumlah penduduk dan tingkat pendidikannya saja, namun juga meliputi pandangan hidup mereka, tingkat kebudayaan, sikap-sikap atau penilaian mereka terhadap pekerjaan, dan besar kecilnya keinginan untuk memperbaiki diri secara kreatif dan otonomi. Selanjutnya, tingkat kecakapan administratif juga merupakan salah satu bentuk sumber daya manusia yang penting karena hal tersebut seringkali menentukan kemampuan dan ketepatan waktu pemerintah dalam memperbaiki struktur produksi secara keseluruhan. Bila kita berbicara mengenai sumber daya manusia, itu berarti kita juga berbicara mengenai rumitnya hubungan antara berbagai macam faktor seperti kebudayaan, tradisi, agama, suku-suku bangsa, dan aneka faktor primordial lainnya. Dengan demikian, jelas kiranya bahwa kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di dalam suatu negara merupakan salah satu determinan yang paling penting atas keandalan struktur perekonomiannya. Tentu saja besar kecilnya pengaruh faktor-faktor primordial itu terhadap struktur perekonomian nasional tidak bisa dipukul rata, karena pengaruh tersebut memang berbeda antara satu negara dengan negara-negara lainnya.

- *Komposisi etnik dan agama*

Salah satu manfaat langsung dari berakhirnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang sudah berlangsung selama 45 tahun adalah turunnya kehadiran politik dan militer mereka di berbagai belahan negara-negara Dunia Ketiga. Namun, hal ini ternyata juga menimbulkan kerugian tidak langsung, yakni bangkitnya persaingan atau bahkan konflik antaretnik, antarsuku, dan antaragama, yang terkadang pecah menjadi kekerasan, selalu ada di hampir semua tempat di negara-negara Dunia Ketiga, namun penarikan dari kekuatan adidaya tidak dipungkiri merupakan pemicu bangkit dan meningkatnya ketegangan dan konflik semacam itu, yang ada kalanya akan meluas menjadi insiden diskriminasi

Namun, itu tidak berarti bahwa keragaman etnik dan agama identik dengan hal-hal menakutkan seperti ketimpangan, kekacauan, atau instabilitas. Kini sudah cukup banyak bukti bahwa negara-negara yang masyarakatnya beragam secara etnik dan agama pun bisa meraih kemajuan-kemajuan yang mengagumkan. Sejumlah negara seperti Malaysia, Mauritius, dan Zimbabwe telah berhasil memadukan kemajuan ekonomi dengan integrasi sosial. Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah komposisi etnik dan agama memainkan peran penting bagi pembangunan. Keragaman bisa mengakibatkan konflik, namun bisa juga menumbuhkan kerjasama yang akan menciptakan sinergi. Celakanya, para ekonom acapkali mengabaikan faktor yang teramat penting ini.

Arti Penting Relatif Sektor Pemerintah dan Swasta

Hampir semua negara-negara Dunia Ketiga menganut sistem ekonomi “campuran” (*mixed economy system*), yaitu suatu sistem yang membiarkan beroperasinya mekanisme pasar bebas (memungkinkan partisipasi aktif oleh pihak atau sektor swasta), akan tetapi sektor pemerintah juga aktif melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mengelola perekonomian nasional pada umumnya, dan mengatur pengalokasian sumber-sumber daya. Pada dasarnya, terpisahnya sektor swasta dari sektor pemerintah, dan juga peranan maupun arti penting masing-masing merupakan suatu akibat yang bersumber dari situasi historis dan politis di setiap negara-negara berkembang. Secara umum, peran sektor swasta di negara-negara Amerika Latin dan Asia Tenggara lebih besar apabila dibandingkan dengan sektor swasta yang terdapat di negara-negara Asia Selatan, apalagi jika dibandingkan dengan yang ada di negara-negara Afrika. Apa yang disebut sebagai sektor swasta itu tidak hanya perusahaan-perusahaan domestik, melainkan juga badan-badan usaha milik asing atau pihak luar negeri. Besar kecilnya pangsa kepemilikan oleh pihak asing di sektor swasta merupakan sebuah variabel penting yang harus dipahami dalam rangka mempelajari perbedaan-perbedaan di antara sesama negara-negara berkembang. Sektor swasta yang terlalu dikuasai oleh pihak asing biasanya akan mendorong timbulnya berbagai peluang sekaligus masalah ekonomi

sama lain, dan ini juga tergantung pada besar kecilnya peranan atau arti penting relatif sektor pemerintahan dan sektor swastanya.

- *Struktur industri*

Sebagian besar negara-negara berkembang adalah negara agraris, baik itu ditinjau dari perspektif ekonomi, sosial dan budayanya. Pertanian, baik itu pertanian subsistem maupun komersial, merupakan aktivitas ekonomi yang utama, baik itu ditinjau dari jumlah atau persentase angkatan kerja yang diserapnya, maupun ditinjau dari proporsi sumbangannya kepada GNP. Bagi sebagian besar penduduk di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, pertanian bukan saja merupakan pekerjaan, namun juga suatu cara hidup. Walaupun demikian, ternyata terdapat perbedaan yang sangat mencolok atas struktur sistem pertanian dan pola kepemilikan tanah di Amerika Latin dan Afrika. Pola pemilikan tanah di Asia hampir sama dengan yang ada di Amerika Latin, namun perbedaan kultural yang mencolok cenderung menipiskan persamaan tersebut.

Sementara itu, peranan sektor manufaktur dan jasa-jasa di antara negara-negara berkembang juga memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok. Sebagian besar negara di Amerika Latin, yang sudah lebih lama menikmati kemerdekaan dan memiliki tingkat pendapatan nasional yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rekan-rekannya di Asia atau Afrika, memiliki sektor industri yang relatif lebih maju. Namun, sejak dekade 1970-an dan dekade 1980-an, beberapa negara di Asia, yakni Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura berhasil mempercepat pertumbuhan output manufaktur mereka sehingga dalam waktu singkat mereka menjadi negara industri baru yang bahkan mampu mengungguli negara-negara Amerika Latin pada umumnya. India juga memiliki sektor manufaktur yang terbesar di negara-negara Dunia Ketiga, namun karena jumlah penduduknya yang begitu besar, maka arti penting dan kemajuan sektor manufaktur di India tersebut terkesan tidak begitu besar.

- *Ketergantungan eksternal: ekonomi, politik, dan kultural*

Sejauh mana tingkat ketergantungan negara terhadap pihak luar, baik itu di bidang ekonomi, sosial, maupun politik, ternyata berkaitan erat dengan

dibutuhkan oleh usaha nasional dalam rangka mengatasi suatu masalah pembangunan. Struktur politik, aneka kepentingan yang bersifat sepihak dan tersembunyi (*vested interests*) serta persekongkolan di kalangan elemen-elemen kelas elit (para tuan tanah, kaum industrialis perkotaan, kalangan bankir, pengusaha asing, perwira-perwira angkatan bersenjata, dan para pengurus serikat buruh) turut menentukan strategi-strategi apa saja yang bisa dijalankan sekaligus menentukan letak dan intensitas hambatan terhadap proses perubahan-perubahan ekonomi dan sosial yang sedang dan akan dilaksanakan.

Pembangunan atau konstelasi kepentingan dan kekuasaan di antara berbagai kelompok masyarakat di sebagian besar negara-negara berkembang itu sendiri lahir sebagai akibat atau konsekuensi logis dari sejarah politik, ekonomi, dan sosial masing-masing negara sehingga yang ada di satu negara cenderung berbeda dengan yang ada di negara lainnya. Pada dasarnya – terlepas dari siapa yang menjadi figurnya, entah itu para perwira militer, kaum industrialis, dan tuan tanah kaya di Amerika Latin; kaum politisi dan pejabat tinggi pemerintah di Afrika; para raja minyak dan tokoh-tokoh keuangan di Timur Tengah; atau pun para tuan tanah, rentenir, dan industrialis di Asia – hampir semua negara-negara berkembang secara langsung atau tidak langsung senantiasa diperintah oleh sekelompok kecil kaum elit. Bila dibandingkan dengan apa yang ada di negara-negara maju (mereka pun dipimpin oleh kelas elit, meskipun dalam taraf yang lebih rendah karena demokratisasi sudah cukup maju) kekuasaan kelas elit di negara-negara Dunia Ketiga jauh lebih besar dan luas.

Bertolak dari kenyataan tersebut, maka setiap perubahan ekonomi dan sosial di negara-negara berkembang senantiasa memerlukan dukungan dari kelompok-kelompok elit, baik melalui persuasi maupun paksaan. Jika mereka tidak bisa dibujuk, maka demi melaksanakan suatu perubahan yang memang diperlukan, mereka harus disingkirkan. Terlepas dari cara mana yang hendak ditempuh, pembangunan ekonomi dan sosial tidak mungkin dilakukan di suatu negara Dunia Ketiga tanpa mengubah lembaga-lembaga sosial, politik, dan ekonomi yang ada di negara yang bersangkutan (misalnya, pembenahan menyeluruh terhadap sistem-sistem pemanfaatan tanah, bentuk-bentuk pemerintahan, struktur pendidikan,

golongan elit di negara mereka sendiri. Standar hidup yang rendah tersebut dimanifestasikan secara kuantitatif dalam bentuk jumlah pendapatan uang yang sangat sedikit (kemiskinan), perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, bekal pendidikan yang minim atau bahkan tidak ada sama sekali, angka kematian bayi yang tinggi, harapan hidup yang relatif sangat singkat, dan peluang mendapatkan pekerjaan yang rendah. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui standar hidup di berbagai negara akan dijelaskan pada bagian berikut ini.

a. Pendapatan nasional per kapita

Angka total pendapatan atau produk nasional bruto (*GNP-Gross National Products*) per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu negara. Konsep GNP itu sendiri merupakan indikator atas besar kecilnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan. GNP adalah nilai moneter (dalam satuan uang) atas segenap kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh penduduk suatu negara, tanpa harus dikurangi oleh depresiasi atas stok modal domestik. Sedangkan yang disebut sebagai produk domestik bruto (*GDP-Gross Domestic Products*) adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian (baik itu yang dilakukan oleh penduduk warga negara maupun orang-orang dari negara lain yang bermukim di negara yang bersangkutan). Jadi, GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan milik penduduk domestik yang dikirimkan dari negara lain berkat kepemilikan mereka atas faktor-faktor produksi (terutama modal dan tenaga kerja di luar negeri – dikurangi dengan pendapatan milik orang asing (atau lebih tepatnya perusahaan-perusahaan asing) berkat kepemilikannya terhadap faktor-faktor produksi yang ada di negara tersebut). Jumlah pendapatan mereka itu acapkali sangat besar. Pada tahun 1997, total produk nasional dari seluruh negara di dunia mencapai nilai lebih dari US\$29 triliun. Dari total nilai tersebut, lebih dari US\$22 triliun dihasilkan oleh negara-negara maju dan kurang dari US\$7 triliun dihasilkan oleh negara-negara berkembang. Apabila ditinjau dari sudut penyebaran penduduk dunia, maka sekitar 80 persen dari nilai total pendapatan dunia dihasilkan oleh negara-negara maju yang jumlah

yang lebih luas dan mendalam tentang kemiskinan di negara-negara Dunia Ketiga, kita perlu pula mempelajari proses melebarnya kesenjangan antara orang-orang kaya dan miskin yang ada di dalam negara-negara berkembang itu sendiri.

Hal penting pertama yang perlu diketahui adalah, bahwasanya tingkat pendapatan dari semua negara di dunia memang tidak sama. Sampai batas tertentu senantiasa terdapat kesenjangan pendapatan (*income inequality*). Antara orang kaya dan miskin di semua negara, baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, pasti terdapat perbedaan atau kesenjangan pendapatan. Hanya saja, ketimpangan di negara-negara berkembang ternyata jauh lebih parah atau lebih besar daripada yang ada di negara-negara maju. Sebagai contoh, apabila kita membandingkan sumbangan dalam pendapatan nasional yang berasal dari 40 persen penduduk termiskin di suatu negara dengan sumbangan dari 20 persen penduduk terkaya sebagai ukuran arbitrer atas tinggi rendahnya tingkat ketidakmerataan itu, maka terlihat bahwa distribusi pendapatan di negara-negara seperti Brasil, Ekuador, Kolombia, Jamaika, Meksiko, Venezuela, Kenya, Sierra Leone, Afrika Selatan, dan Guatemala amat sangat tidak merata. Di sejumlah negara lainnya seperti India, Tanzania, Malaysia, Kosta Rika, Indonesia, Kanada, Jepang, Swedia, dan Korea Selatan, distribusi pendapatannya secara keseluruhan relatif agak merata. Hal penting berikutnya, ternyata tidak ada korelasi yang searah dan baku antara tingkat pendapatan per kapita dengan derajat kesenjangan. Kenya, yang tingkat pendapatan per kapitanya sama rendahnya dengan India, ternyata dililit tingkat ketimpangan pendapatan antara 20 persen golongan kaya dan 40 persen penduduk miskin yang jauh lebih parah. Demikian pula, Kuwait, yang memiliki tingkat pendapatan per kapita yang setara dengan Belgia, kadar ketimpangannya cukup tinggi; porsi pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduknya yang termiskin relatif sangat sedikit. Fenomena ini menggarisbawahi sebuah kenyataan penting, yakni bahwasanya pembangunan ekonomi tidak seyogyanya semata-mata diukur berdasarkan peningkatan GNP secara keseluruhan maupun per kapita saja. Kita juga harus memperhatikan sejauh manakah distribusi pendapatan telah menyebar ke segenap penduduk atau lapisan masyarakat, serta siapa saja yang telah menikmati manisnya buah pembangunan.

poverty line). Secara berkala, para ahli mencoba mereka-reka sejumlah uang yang dianggap minimal untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar, katakanlah sebesar US\$370 (atas dasar harga konstan tahun 1985). Patokan ini kemudian diterapkan lebih lanjut untuk memperkirakan kadar daya beli (*purchasing power equivalent*) atas sejumlah uang yang diukur berdasarkan satuan nilai mata uang dari suatu negara berkembang.

e. Kesehatan

Selain harus membanting tulang untuk mendapatkan penghasilan yang tidak seberapa, banyak penduduk di negara-negara Dunia Ketiga yang masih harus berjuang melawan kekurangan gizi dan hama penyakit. Tidak sedikit yang kemudian terpaksa menyerah, mati karena penyakit atau malnutrisi. Meskipun kondisi kesehatan di banyak negara berkembang sudah mengalami perbaikan berarti sejak tahun 1960, namun pada kenyataannya, pada tahun 1998, rata-rata usia harapan hidup di negara-negara yang terbelakang di dunia hanya mencapai 48 tahun; dibandingkan dengan usia 63 tahun di negara-negara Dunia Ketiga lainnya, dan usia 75 tahun di negara-negara maju. Tingkat kematian bayi (*infant mortality rates*), yakni jumlah anak yang mati sebelum usia 1 tahun untuk setiap 1.000 kelahiran, di negara-negara yang terbelakang mencapai 96; sedangkan di banyak negara berkembang lainnya mencapai 64 dan 8 di negara-negara maju.

f. Pendidikan

Sebagai ilustrasi terakhir atas rendahnya standar hidup penduduk di negara-negara Dunia Ketiga pada umumnya, berikut ini disajikan uraian mengenai distribusi kesempatan menikmati pendidikan. Penyediaan fasilitas pendidikan dasar merupakan prioritas utama bagi semua negara berkembang. Di sebagian besar negara-negara Dunia Ketiga, bagian terbesar anggaran pengeluaran pemerintah dialokasikan ke sektor pendidikan. Walaupun jumlah penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan sudah banyak meningkat, namun tingkat buta huruf masih sangat tinggi, apalagi jika dibandingkan dengan yang ada di negara-negara maju. Sebagai contoh, di antara negara-negara terbelakang,

penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara Dunia Ketiga sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di negara-negara maju.

6. Fasilitas-fasilitas pendidikan di kebanyakan negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan dan kurang memadai. Di samping itu, tingkat kegagalan penyelesaian pendidikan (*dropp out*) relatif tinggi, sedangkan tingkat melek huruf relatif masih sangat rendah.

Masing-masing dari keenam karakteristik itu memerlukan penelitian dan perhatian lebih lanjut agar kita bisa memperoleh suatu pemahaman yang benar-benar komprehensif mengenai aneka permasalahan yang dihadapi negara-negara Dunia Ketiga dan memikirkan cara-cara untuk menanggulangnya. Namun, di luar itu masih ada unsur lagi yang lebih penting, yakni interaksi antara keenam karakteristik tersebut, karena ternyata interaksi itulah yang sesungguhnya mengakibatkan berlarut-larutnya masalah-masalah “kemiskinan, keacuhan pada penyakit” yang mencekik begitu banyak manusia yang tinggal di negara-negara berkembang.

- *Produktivitas yang rendah*

Di samping standar hidup yang rendah, negara-negara berkembang juga menghadapi masalah rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja (*labor productivity*). Untuk mempelajari hal itu terlebih dahulu kita perlu mengetahui konsep fungsi produksi (*production function*), yakni suatu konsep yang secara sistematis menghubungkan output dengan bermacam-macam kombinasi input faktor produksi (sementara tingkat kemajuan teknologi dianggap sebagai faktor konstan) merupakan konsep yang paling sering digunakan untuk menjelaskan cara penduduk menyediakan kebutuhan-kebutuhan materiil mereka. Namun, agar dapat memberi suatu penjelasan yang jernih, konsep fungsi produksi yang bersifat teknis ini masih perlu didukung oleh konseptualisasi input-input (faktor produksi) lainnya yang lebih luas, yakni seperti faktor kecakapan manajerial, motivasi tenaga kerja, dan fleksibilitas kelembagaan. Tadi sudah disebutkan bahwa

benar-benar diperhatikan demi meningkatkan produktivitas. Sebuah peribahasa kuno mengatakan: “Anda memang bisa menuntun seekor kuda ke tengah sungai, tetapi Anda tidak dapat memaksanya meminum air”. Di negara-negara berkembang peribahasa tersebut sama artinya dengan: “Anda memang bisa menciptakan berbagai macam kesempatan ekonomi untuk meningkatkan diri, namun tanpa pengaturan-pengaturan struktural dan kelembagaan yang memadai, semua kesempatan ekonomi tersebut tidak akan membuahkan sesuatu yang berarti.”

Hal penting lainnya yang perlu pula diperhitungkan adalah dampak-dampak dari sikap-sikap kaum pekerja dan pihak manajemen atau para pemilik perusahaan itu sendiri terhadap usaha-usaha memperbaiki diri, khususnya yang berkenaan dengan tingkat kesigapan dalam bekerja, kemauan dan kemampuan untuk melakukan penyesuaian diri sendiri, pemupukan ambisi untuk maju, semangat juang, hasrat untuk menciptakan ide baru dan bereksperimen, pandangan-pandangan mereka terhadap pekerjaan rutin, disiplin, bertanggung jawab, atau eksploitasi, serta kapasitas fisik dan mental yang memadai dari setiap individu agar mereka dapat melaksanakan semua pekerjaan dengan baik dan dapat membuahkan hasil yang memuaskan. Keberhasilan ekonomi yang begitu luar biasa dan mengesankan yang telah diraih “empat macan Asia” – yakni, Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura – kerapian organisasi atas sistem-sistem produksi, serta kecermatan pengaturan institusional di negara-negara industri baru tersebut yang pada berbagai aspeknya memang sengaja diupayakan dalam rangka memacu pertumbuhan produktivitas para pekerjanya.

Rendahnya produktivitas di kebanyakan negara berkembang juga bersumber dari lemahnya kekuatan dan kesehatan fisik para pekerja yang merupakan akibat dari rendahnya tingkat pendapatan. Dengan pendapatan yang serba pas-pasan, tentu saja sangat sulit bagi mayoritas penduduk negara-negara Dunia Ketiga untuk membeli dan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan padat gizi. Seperti diketahui, kekurangan gizi semasa anak-anak dapat membatasi pertumbuhan mental dan fisik. Selain itu, menu makanan yang buruk dan tidak mencukupi, baik kualitas maupun kuantitasnya, serta standar

Tabel 2.1 Angka Kelahiran di Seluruh Dunia, 1996

Angka Kelahiran	Negara
50	Nigeria, Mali, Uganda, Somalia, Gaza, Afghanistan, Angola, Malawi, Sierra Leone
45	Kongo (Rep. Dem.), Kamboja, Ethiopia, Tanzania, Zambia, Gambia, Benin, Burkina Faso, Mozambik, Burundi, Yaman, Togo.
40	Kamerun, Chad, Laos, Sudan, Syria, Zimbabwe, Guinea, Liberia, Senegal, Libya, Nigeria, Bhutan, Rep. Afrika Tengah, Swaziland
35	Honduras, Paraguay, Bolivia, Yordania, Gabon, Nepal, Namibia, Pakistan, Kenya, Irak, Iran, Eotswana.
Angka Kelahiran	Negara
30	Peru, Myanmar, Filipina, Aljazair, Mesir, India, Haiti, Bangladesh, Syria, El Salvador, Paraguay.
25	Kolombia, Panama, Indonesia , Kosta Rika, Meksiko, Kuwait, Libanon, Malaysia, Venezuela, Afrika Selatan
20	Vietnam, Turki, Sri Lanka, Cili, Argentina, Jamaika, Brasil
15	Amerika Serikat, Kanada, Australia, Irlandia, Kuba, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Cina, Thailand
10	Swiss, Austria, Jerman, Jepang, Rusia

Sumber: Todaro (2000)

- *Tingkat pengangguran penuh dan terselubung yang terlalu tinggi dan terus melonjak*

Salah satu manifestasi (akibat) utama sekaligus faktor penyebab rendahnya taraf hidup di negara-negara berkembang adalah terbatasnya penyerapan sumber daya (*employment*), termasuk sumber daya manusia. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju, pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh negara-negara berkembang relatif sangat rendah. Adapun penyebab utamanya ada dua hal. Yang pertama, adalah adanya pengangguran terselubung (*underemployment*); artinya, orang-orang bekerja di bawah kapasitas optimalnya. Ini terlihat dari banyak tenaga kerja di daerah perkotaan maupun pedesaan yang bekerja di bawah jam kerja normal; mereka hanya bekerja secara harian, mingguan, atau bahkan musiman. Pengangguran terselubung atau semi pengangguran tersebut juga meliputi mereka yang bekerja secara normal dengan waktu penuh tetapi produktivitasnya relatif rendah sehingga pengurangan jam kerja tidak akan membawa perubahan atau pengaruh terhadap total output. Adapun yang kedua adalah tingginya tingkat pengangguran penuh atau terbuka (*open unemployment*), yakni orang-orang yang sebenarnya mampu dan ingin bekerja, akan tetapi tidak mendapatkan lapangan pekerjaan sama sekali.

- *Ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor barang-barang primer*

Sebagian besar penduduk negara-negara Dunia Ketiga hidup dan bekerja di daerah pedesaan. Lebih dari 65 persen jumlah penduduk negara-negara berkembang tinggal secara permanen, bahkan turun menurun, di pedesaan; sedangkan penduduk negara-negara maju yang tinggal di desa-desa kurang dari 27 persen. Demikian pula halnya dengan angkatan kerja. Sekitar 58 persen angkatan kerja di negara-negara Dunia Ketiga mencari nafkah di sektor pertanian, sedangkan di negara-negara maju hanya sekitar 5 persen. Sumbangan sektor pertanian terhadap GNP di negara-negara berkembang secara keseluruhan masih berkisar pada angka 14 persen, bandingkan dengan sumbangannya di negara-negara maju yang hanya mencapai 3 persen.

b. Ketergantungan pada Ekspor Primer

Pada umumnya, perekonomian negara-negara berkembang lebih banyak berorientasi ke produksi barang primer (produk-produk pertanian, bahan bakar, hasil hutan dan bahan-bahan mentah) daripada ke barang sekunder (manufaktur) dan barang tersier (jasa-jasa). Komoditi-komoditi primer tersebut merupakan andalan ekspor yang utama ke negara-negara lain (baik ke negara-negara maju maupun ke sesama negara-negara berkembang).

Sebagian besar negara-negara miskin sangat membutuhkan devisa (*foreign exchange*) untuk menambah tabungan domestik dalam rangka membiayai proyek-proyek pembangunan yang teramat penting. Meskipun arus penanaman modal asing dan bantuan luar negeri memang membantu (walaupun belakangan ini jumlahnya justru cenderung terus berkurang), ekspor berbagai macam komoditi primer itu tetap merupakan sumber devisa yang utama bagi negara-negara berkembang; sekitar 60 persen hingga 70 persen devisa mereka peroleh dari ekspor komoditi primer tersebut. Sialnya, banyak negara berkembang yang terlilit utang luar negeri dalam jumlah sangat besar sehingga selama dekade 1980-an dan dekade 1990-an sebagian besar devisa hasil ekspor tersebut harus mereka relakan sebagai pembayaran cicilan dan bunga utang. Bahkan selama beberapa tahun terakhir ini, mereka mengalami arus modal internasional yang negatif; artinya, devisa yang mengalir keluar ternyata lebih banyak daripada yang mengalir masuk.

Sekalipun ekspor sangat penting bagi negara-negara sedang berkembang pada umumnya, namun pertumbuhan ekspor negara-negara Dunia Ketiga (tidak termasuk minyak) ternyata tidak dapat mengimbangi ekspor negara-negara maju. Itulah sebabnya (walaupun dalam tahun-tahun terbaik), negara-negara berkembang pengeksport komoditi primer nonminyak mengalami kemerosotan sumbangan terhadap nilai total perdagangan dunia. Kedudukan mereka bila dibandingkan dengan negara-negara maju semakin lama semakin rendah. Sebagai contoh, di tahun 1950 ekspor mereka hampir mencapai 33 persen dari total nilai perdagangan sedunia. Namun, sejak saat itu sumbangan mereka tersebut terus merosot, bahkan belakangan ini hampir setiap tahunnya berada pada

kepastian hukum begitu minim, jelaslah bisnis takkan dapat diharapkan berkembang dengan baik. Sarana infrastruktur dan keuangan adalah masalah berikutnya. Tanpa adanya jalan-jalan raya, sistem telekomunikasi, listrik, atau sistem perbankan yang kuat serta jaminannya, pasar kredit formal yang melakukan seleksi dan alokasi dana-dana pinjaman berdasarkan profitabilitas ekonomi relatif dan menerapkan aturan pembayaran kembali, serta informasi pasar yang mencukupi bagi konsumen maupun produsen mengenai harga, kuantitas, dan kualitas produk serta sumber-sumber daya seperti juga *creditworthiness* para peminjam potensial. Keenam faktor tersebut, diiringi oleh keberadaan skala ekonomi di berbagai sektor ekonomi (misalnya, industri ekstratif), kecilnya pasar berbagai produk akibat terbatasnya permintaan dan kecilnya penjual, penyebaran eksternalitas (biaya atau keuntungan yang ditimbulkan oleh perusahaan atau individu karena tidak melakukan produksi atau konsumsi) dalam produksi dan konsumsi, dan kelaziman adanya kepemilikan umum sumber-sumber daya (misalnya, tanah penggembalaan ternak, lubuk air) berarti bahwa pasar di negara-negara sedang berkembang tersebut seringkali sangat tidak sempurna. Dalam kondisi seperti ini, informasi juga sangat terbatas dan seringkali menyebabkan barang, keuangan dan sumber-sumber daya sulit menyebar. Pada gilirannya hal ini seringkali mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak tepat. Terlepas dari apakah ketidaksempurnaan pasar (*imperfect markets*) dan ketidaksempurnaan informasi (*incomplete information*) ini perlu diimbangi dengan peningkatan peran pemerintah, yang jelas kedua hal tersebut merupakan ciri menonjol di banyak negara berkembang.

- *Dominasi, ketergantungan, dan kerapuhan dalam hubungan internasional*

Bagi negara-negara berkembang pada umumnya, salah satu faktor utama yang mengakibatkan rendahnya standar hidup masyarakat mereka, serta kian mencoloknya ketimpangan distribusi pendapatan internasional adalah distribusi kekuatan politik dan ekonomi yang sangat tidak merata di antara negara-negara kaya dan miskin. Perimbangan kekuatan yang sangat timpang tersebut tidak hanya berwujud pada kekuasaan negara

Akibat neto dari faktor-faktor tersebut di atas adalah meningkatnya kerapuhan negara-negara Dunia Ketiga terhadap ancaman dan tekanan kekuatan-kekuatan luar yang memang sangat berpengaruh atau bahkan bisa menentukan tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka. Padahal banyak dari negara-negara Dunia Ketiga tersebut yang merupakan negara-negara kecil, sehingga tingkat ketergantungan ekonomi mereka sangat tinggi, dan prospek untuk dapat berdiri sendiri benar-benar minim. Lalu, apa yang harus mereka lakukan? Menarik diri dari perekonomian dunia jelas merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Akan tetapi, harapan untuk mandiri masih bisa diperoleh dengan cara menggabungkan daya dan kekuatan ekonomi mereka sendiri. Kerjasama antara sesama negara-negara berkembang juga dapat memperkuat kekuatan tawar-menawar mereka dalam menghadapi negara-negara maju, serta memungkinkan mereka untuk bersikap lebih cermat dan selektif terhadap tawaran modal asing dan bantuan teknik yang disodorkan oleh negara-negara industri maju.

Sementara itu, bagi sebagian negara-negara Dunia Ketiga yang beruntung memiliki cukup banyak kekayaan alam dan kekuatan tawar-menawar, fenomena dominasi itu terjelma menjadi suatu kecenderungan domestik yang memprihatinkan, yakni “si kaya menjadi semakin kaya”, dan itu seringkali menjadi beban dan pengorbanan si miskin. Namun, seperti telah dijelaskan di atas, masalah pokok yang ada di sini tidak hanya terletak pada semakin cepatnya negara kaya tumbuh meninggalkan negara berkembang, tetapi juga pada kenyataan di dalam masing-masing negara berkembang itu sendiri ada sektor atau kelompok-kelompok relatif kuat yang berusaha terus tumbuh di atas pengorbanan kelompok atau sektor lain yang lebih lemah. Sebagai contoh, sektor-sektor industri atau pertanian modern, tuan-tuan tanah, pemimpin serikat buruh, kaum industrialis, polisi, birokrat, dan pejabat pemerintah yang berkuasa cenderung terus menguat dan semakin kaya atas beban kelompok masyarakat miskin yang jumlahnya jauh lebih besar, namun kekuatan politik maupun ekonominya sangat kecil. Proses ganda (dualistik) – negara-negara kaya dan kelompok elit di dalam negara berkembang menjadi semakin kaya sedangkan yang lainnya (kelompok negara-negara berkembang dan segmen-segmen

Bab 3

Peta dan Perkembangan Teori Pembangunan



Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas peta teori pembangunan dan perkembangan teori pembangunan diawali dengan munculnya teori perubahan sosial, konsep baru dalam teori pembangunan, pembangunan dilihat dari kacamata politik sampai dengan teori pembangunan yang komprehensif serta dalam perspektif ilmu sosial.

Selanjutnya pembahasan perkembangan teori pembangunan dimulai dengan lahirnya teori modernisasi yang menekankan bahwa suatu negara akan bergerak dari keadaan tradisional menuju modern. Selanjutnya muncul teori ketergantungan (dependensi) yang melihat adanya hegemoni negara-negara maju, sehingga muncul ketergantungan dari negara-negara berkembang. Era selanjutnya ditandai oleh munculnya teori pasca ketergantungan yang lebih banyak mengkritik kelemahan teori ketergantungan, yang merupakan awal lahirnya teori pembangunan berkelanjutan dan teori pembangunan manusia.

6. Analisis Pembangunan Dunia,
7. Strategi Pembangunan dan Sistem Dunia,
8. Teori Pembangunan Lain (*Another Development Theory*): sosiologi-politik, egalitarian, pembangunan mandiri, pembangunan berwawasan lingkungan (*eco development*), pembangunan berwawasan etnis (*ethno development*), ekonomi-politik pembangunan.

Suwarsono dan Alvin Y. So (1994) memperkenalkan perubahan sosial dan pembangunan sebagai peta untuk merumuskan teori-teori pembangunan yang digunakan dalam pembahasan selanjutnya. Teori-teori yang muncul melalui pembahasan perubahan sosial, yaitu:

1. Teori Modernisasi Klasik,
2. Teori Modernisasi Baru,
3. Teori Dependensi Klasik,
4. Teori Dependensi Baru,
5. Teori Sistem Dunia/Perspektif Ekonomi Dunia.

Pembahasan Suwarsono selanjutnya dipertegas oleh Arief Budiman pada tahun 1995 melalui perkembangan teori pembangunan dunia ketiga.

1. Teori Modernisasi,
2. Teori Dependensi (ketergantungan),
3. Teori Post-Dependensi (Pasca Ketergantungan),
4. Teori Pembangunan yang lain (*Another Development Theory*).

P.W. Preston (1996) mulai memperkenalkan teori pembangunan yang lebih komprehensif, yang meliputi:

1. Kemunculan teori sosial,
2. Teori ekonomi Adam Smith,
3. Teori Karl Marx,
4. Teori Emile Durkheim; evolusi dan pembagian tenaga kerja,
5. Transisi pekerjaan Marx Weber,
6. Pembagian tenaga kerja terpelajar,
7. Era kolonialisme,

4. Teori Modernisasi,
5. Teori Pertumbuhan Ekonomi (Rostow),
6. Teori Motif Prestasi (McClelland),
7. Teori Penciptaan Tenaga Kerja.

Agus Suryono pada tahun 2006 memperkenalkan teori-teori pembangunan dalam perspektif teori Ilmu Sosial, yang terdiri atas:

1. Teori Global/ Sistem Internasional,
2. Teori Dependensia,
3. Teori Pasca Dependensia,
4. Teori Kapitalis,
5. Teori Kapitalisme Semu (*Erzats Capitalism Theory*),
6. Teori Sosialisme,
7. Teori Pertumbuhan Rostow,
8. Teori Pertumbuhan Todaro.

Perkembangan Teori Pembangunan

1. Teori Modernisasi

Prinsip teori ini bahwa suatu negara akan bergerak dari keadaan tradisional ke keadaan modern. Tradisional merupakan simbol keterbelakangan seperti negara agraris/negara sedang berkembang, sedangkan modern adalah simbol kemajuan sebagaimana keadaan yang terdapat di negara maju (negara industri).

Pergerakan tersebut bersifat linier dan tidak dipengaruhi oleh kondisi lokal dan sejarah yang dialami oleh suatu negara. Kondisi lokal dipandang sebagai suatu yang irasional sedangkan kondisi modern mensyaratkan pemikiran yang serba rasional. Oleh karena itu pemikiran irasional harus diubah menjadi rasional melalui pendidikan, pengembangan kelembagaan, dan kondisi lingkungan.

Kemiskinan atau keterbelakangan diasumsikan sebagai akibat dari faktor internal (nilai-nilai budaya, agama). Sedangkan kemajuan atau modern dianggap sebagai akibat dari penerapan faktor-faktor eksternal.

2. Teori Dependensi

Prinsip dari teori ini adalah penjelasan keterbelakangan negara-negara dunia ketiga sebagai akibat dari hegemoni ekonomi, politik, budaya dan intelektual negara maju (negara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa).

Teori ini pada prinsipnya dibedakan dalam 2 (dua) aliran, yaitu: teori ketergantungan klasik dan teori ketergantungan baru. Perbedaan prinsip dari kedua aliran (mazhab) tersebut adalah bahwa pada aliran teori ketergantungan klasik, keterbelakangan yang terjadi di dunia ketiga disebabkan oleh faktor eksternal khususnya faktor ekonomi, yang pada akhirnya mengakibatkan adanya polarisasi regional dan keterbelakangan. Kondisi ini berlaku umum tanpa mengenal batas wilayah. Pada aliran teori ketergantungan baru, keterbelakangan yang terjadi di negara dunia ketiga disebabkan oleh faktor internal yang memiliki batas ruang dan waktu serta didominasi oleh masalah sosial politik (bukan ekonomi).

a. Teori Ketergantungan Klasik (Lama)

Beberapa pemikiran yang termasuk dalam teori ketergantungan klasik adalah:

- **Andre Gunder Frank**, mengemukakan bahwa hubungan antara negara dunia ketiga (pinggiran) dengan negara maju (pusat) sebagai hubungan yang selalu merugikan negara dunia ketiga, dan berakibat pada terjadinya keterbelakangan di negara dunia ketiga. Oleh karena itu negara dunia ketiga harus memutuskan hubungan tersebut jika ingin maju.
- **Theotonio Dos Santos**, berargumentasi bahwa keterbelakangan negara pinggiran pada dasarnya sama dengan apa yang dikemukakan oleh Frank di atas, namun untuk menyelesaikan masalah keterbelakangan tersebut tidak harus memutuskan hubungan dengan negara pusat, karena negara pinggiran hanya merupakan bayangan negara pusat. Jika negara pusat maju, maka negara pinggiran akan ikut maju demikian pula sebaliknya jika negara pusat mundur, maka negara pinggiran juga ikut mundur. Jadi penyelesaian masalah keterbelakangan di negara pinggiran sangat tergantung pada negara maju (pusat).

termasuk dalam teori pasca ketergantungan antara lain: teori sistem dunia, teori liberal, teori artikulasi dan teori neo-liberalisme. Bahasan ini ditekankan pada sistem dunia dan teori neo-liberalisme, karena teori lainnya hanya bersifat mendukung teori tersebut dengan metode yang berlainan.

a. Teori Sistem Dunia

Pada prinsipnya teori ini muncul untuk menjelaskan terjadinya dinamika sistem kapitalisme global yang memberikan peluang bagi negara-negara untuk berkembang atau terbelakang.

Tokoh yang memelopori teori ini adalah Wallerstein. Menurut tokoh ini, bahwa pada dasawarsa 90-an terjadi penggabungan sistem-sistem ekonomi kecil menjadi sistem ekonomi besar (global). Penggabungan ini terjadi melalui sistem politik, misalnya: iklim demokratisasi pemerintahan. Penggabungan atau penyatuan ini diikuti oleh penyatuan sistem ekonomi melalui pertukaran di pasar dengan kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi sebagai sarana pendukungnya.

Secara spasial Wallerstein membedakan kemajuan negara menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu : kelompok pusat, kelompok semi pinggiran dan kelompok pinggiran. Perbedaan inti dari ketiga kelompok ini adalah kekuatan ekonomi dan politik dari masing-masing kelompok. Kelompok yang paling kuat adalah negara-negara pusat, mengambil keuntungan yang paling banyak, karena kelompok ini bisa memanipulasikan sistem dunia sampai batas-batas tertentu. Selanjutnya, negara setengah pinggiran mengambil keuntungan dari negara-negara pinggiran yang merupakan pihak yang paling dieksploitir

b. Teori neo-liberalisme

Teori liberal menekankan pada kebebasan politik, sedangkan teori neo-liberalisme selain kebebasan politik juga ditekankan pada kebebasan bidang ekonomi. Secara definisi neo-liberalisme dipandang sebagai sebuah sarana bagi idealisme persaingan bebas menjadi sebuah filsafat yang berdasarkan pada tindakan suatu negara dan reformasi sosial untuk mengatasi kemiskinan akibat industrialisasi. Dalam pandangan ini negara

Bab 4

Teori Modernisasi



Pendahuluan

Prinsip teori ini adalah bahwa suatu negara akan bergerak dari keadaan tradisional ke keadaan modern. Tradisional merupakan simbol keterbelakangan seperti negara agraris/negara sedang berkembang, sedangkan modern adalah simbol kemajuan sebagaimana keadaan yang terdapat di negara maju (negara industri).

Pergerakan tersebut bersifat linier dan tidak dipengaruhi oleh kondisi lokal dan sejarah yang dialami oleh suatu negara. Kondisi lokal dipandang sebagai suatu yang irasional sedangkan kondisi modern mensyaratkan pemikiran yang serba rasional. Oleh karena itu pemikiran irasional harus diubah menjadi rasional melalui pendidikan, pengembangan kelembagaan, dan kondisi lingkungan.

Kemiskinan atau keterbelakangan diasumsikan sebagai akibat dari faktor internal (nilai-nilai budaya, agama). Sedangkan kemajuan atau modern dianggap sebagai akibat dari penerapan faktor-faktor eksternal. Dalam konteks ini faktor eksternal dianggap sebagai obat mujarab untuk mengobati kemiskinan.

Max Weber: Etika Protestan

Berbeda dengan Teori Harrod-Domar, Teori Weber mempersoalkan masalah manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya di sekitarnya, khususnya nilai-nilai agama. Max Weber adalah sosiolog Jerman yang dianggap sebagai bapak sosiologi modern. Dia membahas bermacam gejala kemasyarakatan, misalnya tentang perkembangan bangsa-bangsa di dunia, tentang kepemimpinan, tentang birokrasi, dan sebagainya. Salah satu topik yang penting bagi masalah pembangunan yang dibahas oleh Max Weber adalah tentang peran agama sebagai faktor yang menyebabkan munculnya kapitalisme di Eropa Barat dan Amerika Serikat (Budiman, 2000).

Dalam bukunya Weber mencoba menjawab pertanyaan mengapa beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat mengalami kemajuan ekonomi yang pesat di bawah sistem kapitalisme. Setelah melakukan analisis, Weber mencapai kesimpulan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah apa yang disebutnya sebagai **Etika Protestan**.

Etika Protestan lahir di Eropa melalui agama Protestan yang dikembangkan oleh Calvin. Di sini muncul ajaran yang mengatakan bahwa seseorang itu sudah ditakdirkan sebelumnya untuk masuk ke surga atau neraka. Tetapi, orang yang bersangkutan tentu saja tidak mengetahuinya. Karena itu, mereka menjadi tidak senang, menjadi cemas, karena ketidakjelasan nasibnya ini.

Salah satu cara untuk mengetahui apakah mereka akan masuk surga atau neraka adalah keberhasilan kerjanya di dunia yang sekarang ini. Kalau seseorang berhasil dalam kerjanya di dunia, hampir dapat dipastikan bahwa dia ditakdirkan untuk naik ke surga setelah dia mati nanti. Kalau kerjanya selalu gagal di dunia ini, hampir dapat dipastikan bahwa dia akan pergi ke neraka.

Adanya kepercayaan ini membuat orang-orang penganut agama Protestan Calvin bekerja keras untuk meraih sukses. Mereka bekerja keras tanpa pamrih: artinya mereka bekerja bukan untuk mencari kekayaan material, melainkan terutama untuk mengatasi kecemasannya. Inilah yang disebut sebagai Etika Protestan oleh Weber, yakni cara bekerja yang keras dan sungguh-sungguh, lepas dari imbalan materialnya.

yang masih bayi ini harus dilindungi dari industri-industri besar yang sudah sangat kuat di negara-negara maju. Oleh karena itu, pemerintah perlu melindungi industri-industri bayi ini melalui kebijakan proteksi. Baru setelah industri bayi ini menjadi dewasa dan sanggup bersaing dengan industri-industri yang ada di negara pusat, proteksi ini ditarik kembali.

Ekspor barang-barang primer masih tetap penting perannya, karena dari devisa yang dihasilkannya dapat diimpor barang-barang modal berupa mesin-mesin industri. Sementara itu diusahakan terus supaya barang-barang modal ini di kemudian hari bisa dibuat sendiri oleh negara-negara ini. Peran pemerintah dalam proses industrialisasi, seperti sudah diuraikan di atas, menjadi besar. Bagi Prebisch, campur tangan pemerintah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk membebaskan negara-negara ini dari rantai keterbelakangannya.

Kendati demikian, perlu dicatat bahwa Prebisch atau ECLA tidak menganjurkan ekonomi yang dipimpin oleh negara, seperti yang terjadi di negara-negara sosialis sebelum terjadi perubahan pada tahun 1990. Teori pembangunan yang dikembangkan di ECLA menolak teori ekonomi terpimpin maupun teori ekonomi liberal yang membolehkan segalanya. Ekonomi pasar harus dipertahankan, tetapi melalui pengarahan dari Negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori ECLA sedikit banyak dipengaruhi juga oleh teori Keynes, dalam arti teori ini menolak system ekonomi liberal dimana negara harus benar-benar tidak ikut campur, kecuali sebagai penjaga kemurnian system pasar.

Seperti diuraikan sebelumnya, Raul Prebisch dengan ECLAnya tetap memberikan sumbangan pemikiran yang penting terhadap teori pembangunan di negara-negara berkembang. Dialah yang secara konseptual melakukan kritik terhadap Teori Pembagian Kerja Secara Internasional dalam perdagangan internasional yang bebas.

Prebisch kemudian menganjurkan supaya negara-negara pertanian melakukan industrialisasi untuk mengatasi keterbelakangannya, dimulai dengan industri substitusi impor. Setelah Prebisch, praktis Teori Pembagian Kerja Secara Internasional menjadi kurang diminati di negara-negara berkembang.

Prebisch juga merupakan orang pertama yang mencetuskan istilah *negara pusat* untuk negara-negara industri maju, dan negara pinggir

mengarungi samudra dan bertualang di negara-negara lain adalah untuk menyebarkan agama. Mereka ingin membaptis orang-orang yang masih dianggap barbar, yang masih belum mengenal Tuhan. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan pahala dari agama mereka, karena berhasil menyelamatkan orang lain di dunia ini dari dosa-dosanya. Begitulah pemikiran yang ada di benak orang-orang Eropa ketika itu. Karena itulah, dalam kapal-kapal yang mengarungi samudra ke benua Amerika, Afrika, dan Asia, disamping membawa tentara (yang katanya untuk melindungi diri bila diserang), mereka juga membawa para pendeta.

Bahwa misi ini kemudian berkembang menjadi dominasi politis dan ekonomis orang-orang Eropa terhadap negara-negara yang dikunjunginya, itu adalah akibat sampingan dari pengembaraan untuk penyebaran agama ini. Demikian teori ini menyatakan.

2. *Teori Glory*

Kelompok teori kedua yang akan dibahas adalah kelompok teori Glory, yang menjelaskan bahwa dorongan utama dari imperialisme dan kolonialisme bukan kepentingan agama atau ekonomi, melainkan kehausan akan kekuasaan dan kebesaran. Salah satu pencetus teori ini yang terkenal adalah Joseph A. Schumpeter. Dia membantah bahwa imperialisme dan kolonialisme digerakkan oleh dorongan ekonomi. Dia memberikan bukti-bukti bahwa banyak negara Eropa sebenarnya mengalami kerugian secara ekonomis karena petualangannya menjadi imperialis dan kolonialis.

Bagi Schumpeter, kapitalisme bertentangan dengan imperialisme. Kapitalisme dibangun atas dasar rasionalitas, sedangkan imperialisme tidak. Imperialisme didorong oleh keinginan untuk berperang, untuk membuktikan keperkasaan diri. Hal-hal seperti ini jauh dari pikiran seorang kapitalis yang rasional. "Karena itulah setiap perang selalu secara seksama diberi alasan sebagai perang untuk mempertahankan diri oleh semua pemerintah yang terlibat, dan oleh semua partai politik dalam pernyataan resmi mereka - ini berarti bahwa pernyataan perang dengan alasan lain merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima secara politis..." demikian Schumpeter. Selanjutnya, dia juga menyatakan:

Dalam sebuah dunia kapitalis yang murni, energi yang dulunya dipakai untuk perang diubah menjadi energi untuk bekerja dalam segala

“Bungkusan” yang dipakai untuk membenarkan pelampiasan agresivitas dan nafsu berperang ini adalah slogan yang menyatakan bahwa semua ini dilakukan demi kebesaran nasional. Atau ekspansi ini diperlukan untuk kepentingan ekonomi. Bungkus ini diperlukan karena ekspansi yang didasarkan pada agresivitas dan nafsu berperang jelas tidak bisa diterima oleh masyarakat manusia yang sudah berbudaya tinggi. Bagi Schumpeter, imperialisme dan kolonialisme bukan dimaksudkan demi kepentingan ekonomi, tetapi kepentingan ekonomi (dan kebesaran bangsa) dipakai sebagai alasan untuk menutupi dorongan yang sebenarnya.

Schumpeter menjabarkan teori itu dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1919 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1951, dengan judul *Imperialism and Social Classes*.

Tentu saja, ada banyak kritik terhadap teori Schumpeter ini. Misalnya, Greene menyatakan bahwa definisi yang diberikan oleh Schumpeter tentang imperialisme sebagai suatu kecenderungan agresif tanpa objek (maksudnya: lebih untuk menyalurkan dorongan agresif tersebut) kelihatannya sulit dipertahankan, karena dari sejarah kita ketahui ada banyak perang untuk menduduki suatu daerah yang motivasinya adalah untuk mendapatkan padang rumput yang lebih subur, atau di daerah tersebut ada tambang emas, atau untuk mendapatkan budak, dan sebagainya. Semua ini mempunyai objek yang jelas.

Juga dengan teorinya tentang agresivitas sebagai unsur utama dari imperialisme, Schumpeter seakan-akan menutup mata terhadap imperialisme yang tidak memakai kekerasan. Misalnya penguasaan sebuah negara oleh negara lainnya melalui kekuatan ekonomi tanpa diadakan peperangan tampaknya tidak dianggap sebagai gejala imperialisme oleh Schumpeter.

Di samping kritik di atas, ada banyak lagi kritik lain. Tetapi, karena tujuan dari pembahasan ini bukan untuk mempersoalkan teori Schumpeter, kiranya contoh kritik di atas dapat dianggap cukup. Yang lebih penting lagi, melalui teori Schumpeter, kita mempunyai gambaran tentang salah satu teori yang tergolong dalam kelompok teori-teori Glory.

Mengapa negara-negara yang menjadi korban imperialisme tidak bisa mengembangkan dirinya, berbeda dengan kapitalisme yang menggejala di negara-negara pusat dulu? Menurut Baran kapitalisme di negara-negara pusat bisa berkembang karena adanya tiga prasyarat:

- (1) Meningkatnya produksi diikuti dengan tercabutnya masyarakat petani dari pedesaan;
- (2) Meningkatnya produksi komoditi dan terjadinya pembagian kerja mengakibatkan sebagian orang menjadi buruh yang menjual tenaga kerjanya sehingga sulit menjadi kaya, dan sebagian lagi menjadi majikan yang bisa mengumpulkan harta;
- (3) Mengumpulnya harta di tangan para pedagang dan tuan tanah.

Faktor ketiga itulah yang membuat kapitalisme dimungkinkan di Eropa. Surplus yang ada di tangan para pedagang dan tuan tanah kemudian diinvestasikan ke bidang industri.

Pada umumnya yang terjadi di negara-negara pinggiran justru sebaliknya. Munculnya kekuatan ekonomi asing dalam bentuk modal kuat dari dunia Barat ke negara-negara Dunia Ketiga, membuat surplus yang terjadi di sana, diambil oleh kaum pendatang, melalui berbagai macam cara. Maka yang terjadi di negara-negara pinggiran bukanlah akumulasi modal, melainkan penyusutan modal. Marilah kita lihat bagaimana Baran menjelaskan proses penyusutan modal yang terjadi di negara-negara Dunia Ketiga, sebagai akibat dari datangnya modal asing.

Negara-negara Dunia Ketiga yang pra-kapitalis pada dasarnya merupakan negara yang masih menganut sistem feodal. Dalam sistem ini, kalau dia berkembang secara wajar, meskipun lambat, terjadi kemajuan-kemajuan. Ini artinya, negara-negara Dunia Ketiga juga mengalami proses yang pada dasarnya sama dengan feodalisme di Eropa yang kemudian melahirkan kapitalisme. Pandangan ini berbeda dengan pandangan Marx yang mengatakan bahwa di negara-negara bukan Eropa berlaku "cara produksi Asia", yang berlainan dengan sistem feodal di Eropa. Untuk memperkuat teorinya ini, Baran menunjuk feodalisme Jepang yang berkembang menjadi kapitalisme yang kuat karena tidak diganggu dari luar. Sebaliknya dengan India, yang tidak mengalami perkembangan akibat imperialisme Inggris.

Teori Sistem Dunia

- *Sekilas tentang teori sistem dunia*

Teori sistem dunia (Wallerstein) beranggapan bahwa dulu dunia dikuasai oleh sistem-sistem kecil atau sistem mini dalam bentuk kerajaan atau bentuk pemerintahan lainnya, dan sistem mini ini tidak saling berhubungan. Dengan kata lain dunia terdiri dari banyak sistem mini yang saling terpisah.

Kemudian terjadi penggabungan, sebuah kerajaan besar muncul. Karena besarnya yang luar biasa dibandingkan dengan kerajaan yang ada sebelumnya, maka kerajaan ini disebut sebagai kerajaan dunia atau *world empire* yang menguasai kawasannya melalui sistem politik.

Perkembangan teknologi perhubungan dan perkembangan di bidang lain kemudian memunculkan sistem perekonomian dunia yang menyatu. Sistem perekonomian dunia menghubungkan kawasan-kawasan yang ada di dunia ini melalui pertukaran di pasar. Sistem perekonomian dunia berkembang secara mantap sejak abad ke 16, dan sudah menguasai dunia pada saat ini.

Sistem dunia yang ada sekarang adalah kapitalisme global. Wallerstein menambah kelompok setengah pinggiran kepada teori ketergantungan yang terdiri dari kelompok negara pusat dan kelompok negara pinggiran. Perbedaan inti dari ketiga kelompok ini adalah kekuatan ekonomi dan politik dari masing-masing kelompok.

Kelompok negara-negara pusat adalah yang paling kuat. Kelompok ini adalah kelompok negara-negara kuat mengambil keuntungan yang paling banyak karena kelompok ini bisa memanipulasikan sistem dunia sampai batas-batas tertentu. Kelompok negara setengah pinggiran mengambil keuntungan dari negara-negara pinggiran yang merupakan pihak yang paling dieksploitir.

Dinamika dari ketiga kelompok negara ini ditentukan oleh sistem dunia. Semua sistem sosial harus dilihat sebagai sebuah keseluruhan. Negara kebangsaan dalam sebuah dunia yang modern bukan lagi sebuah sistem yang tertutup dan karena itu tidak bisa dianalisis seakan-akan berdiri sendiri.

raksasa di negara kuat yang melakukan ekspansi ke luar untuk bekerja sama. Proses ini meningkatkan posisi negara pinggiran menjadi setengah pinggiran.

3. Kenaikan kelas terjadi karena negara tersebut menjalankan kebijakan untuk memandirikan negaranya. Hal ini ditentukan oleh kondisi sistem dunia yang ada dimana saat negara mencoba memandirikan dirinya, peluang dari sistem dunia memang ada. Kalau tidak, usaha ini bisa gagal.

Kritik terhadap teori sistem dunia ini adalah perhatiannya yang kurang terhadap struktur internal dari negara-negara yang ada. Dinamika utama diberikan pada faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor eksternal ini adalah sistem dunia yang merupakan hasil interaksi dari negara-negara yang ada.

Teori sistem dunia merupakan teori baru dalam kelompok teori-teori pembangunan yang mencoba memecahkan masalah-masalah yang terdapat pada teori ketergantungan klasik. Untuk tujuan memecahkan persoalan yang ada, teori baru ini juga menciptakan persoalan baru. Dengan lain perkataan bahwa dalam perkembangan dunia ilmu terjadi ironisme bahwa penyempurnaan melahirkan lagi tantangan baru.

- ***Strategi pemasaran internasional***

Kebanyakan negara, strategi pemasaran internasionalnya menganut paham *market based strategy* yang dikembangkan oleh Michael E. Porter. Pandangan akan market base (MB) selalu mengawali pemikirannya dengan melihat prosesnya terlebih dahulu, dengan melakukan analisis lingkungan eksternal dan dengan melihat lingkungan internal organisasinya. Analisis lingkungan industri menitikberatkan pada intensitas persaingan *demand-supply*, rintangan masuk, dan adakah produk substitusi atau tidak. Model analisis industri yang dipakai adalah Model Five Forces dari M.E. Porter (1980) yang selalu menjadi rujukan utama dari setiap rancangan bisnis. Fokus penyusunan strategi bersaing diletakkan pada cara memproteksi pasar dengan membuat rintangan bagi pesaing agar mengalami kesulitan untuk dapat memasuki pasar (*barrier to entry*).

1. Banyak organisasi yang gagal untuk keluar dari lingkaran paradigma lama dalam menyiasati bisnisnya.
2. Banyak organisasi yang gagal dalam mempersiapkan masa depannya. Mereka tidak mampu menciptakan masa depan dengan proses pembelajaran kolektif yang mengintegrasikan *distinctive* baik intra maupun antar perusahaan.

- **Strategi pemasaran internasional Indonesia**

Kinerja pemasaran internasional beberapa dasawarsa terakhir terlihat masih jauh dari tahap pemasaran internasional maupun global yang sebenarnya. Langkah-langkah yang dilakukan hanya terbatas pada promosi ekspor menggunakan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif di pasar yang berbasis sumber daya alam dan komoditas yang berakar di Indonesia.

Apa yang sudah dilakukan perlu ditata ulang melalui strategi yang lebih komprehensif yaitu yang berdasarkan daya saing berupa keunggulan berbasis sumber daya baik *tangible* maupun yang *intangible* dan kompetensi inti.

Menjabarkan visi, strategi, dan orientasi pemasaran internasional Indonesia perlu melihat struktur dan komposisi global, serta kelompok negara-negara strategis yang sangat potensial menjadi pesaing Indonesia di pasar internasional seperti Vietnam, Thailand, India, China, Brasil dan Afrika Selatan. Penataan ulang strategi pemasaran internasional dapat dilakukan dengan cara menelusuri tiga macam *strategic resources*, yaitu: *tangible resources*, *intangible resources*, dan *indirect resources*.

Tangible resources dicontohkan melalui karyawan atau SDM, pelanggan, kapasitas, dana, dan produk. *Intangible resources* dicontohkan dengan: keterampilan karyawan, mutu pelanggan, efisiensi biaya produksi, dan mutu produk. *Indirect resources* adalah moral karyawan, reputasi Indonesia di mata pelanggan dan reputasi di mata rakyat Indonesia sendiri.

Pada saat ini, pemasaran internasional Indonesia masih berdasarkan keunggulan sumber daya alam, belum berbasis pada pengetahuan atau sumber daya *tangible* dan *intangible*.

industri, perdagangan, dan investasi untuk meningkatkan daya saing global dan membuka aksesibilitas terhadap kesempatan kerja agar tercipta keunggulan bersaing sesuai dengan *endowment* yang dimiliki Indonesia, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Disamping itu, kebijakan untuk meningkatkan ekspor juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan Kawasan Pengembangan Ekspor Terpadu (KAPET). Dalam kebijakan ini, kegiatan usaha yang berada dalam KAPET diberikan fasilitas fiskal berupa beberapa fasilitas di bidang pajak penghasilan. Sementara itu pajak ekspor yang merupakan distorsi dalam kegiatan ekspor juga harus diturunkan.

Kemajuan teknologi informatika dengan diluncurkannya *e-commerce* dan *e-business* sebagai derivasi dari perkembangan jaringan internet juga harus disikapi sebagai peluang untuk meningkatkan ekspor. Untuk itu kebijakan pengembangan jaringan sistem informatika di bidang ekspor mutlak diperlukan.

Sementara itu, banyak eksportir yang masih menyimpan pendapatan valuta asingnya di luar negeri karena ketidakstabilan nilai tukar rupiah. Agar para eksportir mau membawa pendapatannya ke dalam negeri, maka diperlukan kebijakan penjaminan nilai mata uang (*hedging*) atas devisa yang didapat oleh eksportir.

Bidang impor

Hambatan impor secara klasik dapat dilakukan melalui kebijakan tarif (menetapkan tarif bea masuk yang tinggi) dan kebijakan non tarif (mengenakan kuota) atas komoditas impor tertentu. Namun dengan kesepakatan perdagangan dunia, maka hambatan perdagangan baik berupa tarif maupun non tarif harus dihapuskan.

Kebijakan yang paling tepat untuk menghambat lajunya impor adalah melalui penyediaan barang-barang impor tersebut di dalam negeri (substitusi impor). Industri-industri yang menghasilkan komoditas substitusi impor harus didorong dengan peningkatan produksi dan efisiensinya.

Akhir-akhir ini impor sepeda motor dari China disamping impor barang-barang konsumsi seperti mobil-mobil mewah yang dengan

berlaku pada akhir abad 19. Pemikiran-pemikiran baru yang lebih mampu memberi jawaban dan lebih tanggap terhadap persoalan mendasar dalam masyarakat pada waktu itu sangat dibutuhkan. Pemikiran-pemikiran baru yang kemudian naik ke permukaan dan mendominasi perdebatan-perdebatan politik, sosial dan ekonomi dikenal sebagai liberalisme baru (*new liberalism*).

Pada tahun 1880-an jurnalis sayap kiri yang menamakan dirinya kelompok radikal atau progresif baru berpikir dalam kerangka radikalisme London. Radikalisme tersebut diarahkan pada reformasi sosial (berlainan dengan kelompok radikal sebelumnya yang lebih menekankan reformasi politik).

Tulisan-tulisan kelompok liberal baru yang sering juga disebut sebagai liberal progresif atau radikal baru, dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: yang diterbitkan lewat surat kabar, yang seringkali anonim, dan tulisan-tulisan yang berupa pemikiran-pemikiran yang lebih luas dan bersifat teoritis, terutama hasil tulisan Hobson dan Hobhouse. Tulisan-tulisan mereka memperlihatkan sikap-sikap mereka mengenai fungsi positif negara. Mereka melihat negara sebagai alat untuk memperbaiki kondisi sosial dan industri yang buruk.

Penekanan pada reformasi sosial dalam pemikiran mereka tidak saja merupakan ciri menonjol dari liberalisme baru, tapi sekaligus menunjukkan arah transformasi yang dialami liberalisme menjelang abad dua puluh. Perubahan dari liberalisme lama ke liberalisme baru adalah bagian dari berbagai perubahan yang terjadi diberbagai bidang dalam masyarakat barat (Inggris pada khususnya) yang bersifat etis.

Kaum liberal progresif berkeinginan untuk meletakkan prinsip dan tujuan moral pada ideologi reformis liberal baru. Liberalisme baru merupakan bentuk liberalisme yang paling etis baik secara politis maupun intelektual.

Konsep teori neo-liberalisme

Pengertian dari '*New Liberalisme*' bukanlah suatu bentuk ideologi yang sama sekali baru dan berbeda dengan Liberalisme yang ada pada waktu itu. Beberapa ilmuwan tidak secara tegas memberi batasan yang jelas

individu dalam masyarakat, negara dan individu dalam konsepnya tidak diletakkan dalam posisi saling berhadapan, memungkinkan peran aktif negara memberikan satu basis pembenaran liberal bagi pembentukan negara kesejahteraan dikemudian hari.

Teori John Stuart Mill

Redistribusi kekayaan menunjukkan pencampuran antar elemen individualisme klasik dengan gagasan sosialis. Perlunya dilakukan suatu perubahan sistem distribusi kekayaan yang berlaku saat itu, agar memungkinkan kebebasan ekonomi bagi semua orang. Ekonomi sebagai salah satu unsur penting disamping politik.

Teori Arnold Toynbee

Mengkritik ide dasar ekonomi klasik: kompetisi bebas, dan *Laissez-faire*, karena keduanya hampir tidak mempunyai kaitan dengan dunia nyata. Dalam realita ternyata lebih banyak orang yang mengejar kepentingannya tanpa membawa kebaikan sosial.

Menurut Hobhouse, teori tatanan alamiah dirumuskan pada waktu masyarakat harus menghadapi kekuasaan otoriter baik dari negara maupun gereja, diawal perkembangan liberalisme. Teori-teori yang dibentuk mengandung unsur kebebasan personal, sipil dan ekonomi, karena itu sikap membela hak-hak individu yang diselaraskan dengan tatanan alamiah. Kelemahan dan kelebihan Teori Neo-Liberalisme bisa dilihat pada Tabel 7.1.

Kebijakan neoliberalisme dalam pembangunan

Neoliberalisme memiliki cita-cita untuk mengintegrasikan perekonomian dunia. Untuk mewujudkan keinginan ini, proses pelembagaan paham neo-liberalisme dilakukan secara sangat intensif. Berbagai pembicaraan di tingkat internasional dalam pengaturan dan persetujuan antar negara menunjukkan usaha keras untuk mengintegrasikan perekonomian antarnegara (globalisasi). Globalisasi telah menjadi kenyataan dengan selesainya Putaran Uruguay yang merupakan putaran ke delapan sejak disepakatinya Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT)

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apabila diterapkan di dunia ketiga belum tentu cocok, karena pasar perekonomian negara yang berkembang tidak kompetitif. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apabila diterapkan dapat mengurangi beban pemerintah terutama subsidi.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tumbuhnya negara kuat dan miskin. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbukanya transfer teknologi dan informasi.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eksploitasi yang besar terhadap sumber daya alam. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjadikan negara lebih mandiri.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membutuhkan modal dan sumber daya manusia yang kuat. 	-

Kebijakan di tingkat global ini memiliki dampak terhadap kebijakan pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga, terutama yang menyangkut beberapa produk vital di sektor pertanian dan produk tekstil. Secara umum, menurut Indrawati, liberalisasi akan menguntungkan bagi negara berkembang, karena ekspor terutama produk manufaktur yang bersifat padat karya akan meningkat dengan liberalisasi perdagangan. Namun, derajat manfaat dan keuntungan yang dapat dinikmati akan bergantung kepada reformasi kebijakan yang dianut serta struktur perekonomiannya. Keuntungan yang dinikmati ini pun merupakan keuntungan dalam jangka panjang, sedangkan dalam jangka pendek (masa transisi dan penyesuaian) adalah kondisi sulit dan tekanan inflasi, pengurangan kesempatan kerja, pengurangan rente bagi golongan yang diproteksi, dan tekanan neraca pembayaran. Sedangkan struktur ekonomi merata cenderung lebih besar keberhasilannya, karena adanya sharing risk dalam kelompok yang lebih besar (Indrawati, 1997:42).

Secara umum, kebijakan neoliberalisme dalam pembangunan lebih bersifat pragmatis (*pragmatic policy*) dan mengarah kepada liberalisasi perekonomian. Bear dan Maloney (1997:311-326), dengan mengambil kasus di Amerika Latin, mencatat beberapa kebijakan yang ditempuh oleh neoliberalisme dalam praktek pembangunan Dunia Ketiga.

yang dapat digunakan oleh negara-negara di dunia untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Dana ini diperkirakan sekitar \$ 3 triliun atau sekitar $\frac{3}{4}$ dari seluruh APBN negara G-7. Permasalahannya adalah akses terhadap dana swasta itu, karena jumlah negara yang membutuhkan cukup banyak, sehingga pemilik modal menentukan persyaratan-persyaratan yang cukup berat. Antara lain, adanya jaminan peminjam bahwa setiap investasi yang dilakukan dijamin memberi keuntungan bagi pemilik modal. Persyaratan ini memiliki makna bahwa upah buruh harus ditekan rendah, dan buruh harus bekerja lebih lama. Dampaknya, persaingan antarnegara dalam memperoleh dana internasional akan menyebabkan investasi modal asing di suatu negara belum tentu menjamin terciptanya perbaikan taraf hidup rakyat yang membutuhkan pekerjaan. (Sutrisno, 1995:124).

- *Ketujuh*, kebijakan reformasi jaminan sosial. Kekurangan modal pembangunan, memaksa negara-negara berkembang meminjam kepada badan-badan keuangan dunia. IMF, sebagai salah satu pemberi pinjaman, sering memberlakukan berbagai persyaratan bagi peminjam dana. Alasan efisiensi ekonomi, memaksa negara-negara berkembang memotong dan bahkan menghilangkan berbagai subsidi dan jaminan sosial bagi masyarakat. Diturunkannya berbagai subsidi dalam beberapa tahun terakhir, seperti subsidi BBM, listrik dan beberapa produk lain, menimbulkan dampak yang sangat memberatkan masyarakat bawah. Kemampuan masyarakat yang rendah akan semakin terpuruk, dengan naiknya harga BBM, tarif listrik, dan lain-lainnya.
- *Kedelapan*, kebijakan reformasi pasar tenaga kerja.

Praktek Neo Liberalisme di Beberapa Negara

Implikasi bagi kebijakan pembangunan

Implikasi teoritis

Semakin banyaknya negara-negara di dunia yang menjadi negara industri, industrialisasi kehilangan status kuncinya sebagai tanda pembangunan nasional. Menurut Gerry Gereffi (1992:13) terdapat dua implikasi teoritis

food (makanan), *fashion* (pakaian), dan *fun* (hiburan). Modal asing nampak bersifat sangat ekspansionis terhadap pasar.

Kedua, globalisasi investasi mendorong tumbuh dan menyebarnya perusahaan transnasional (TNC) ke seluruh penjuru dunia. TNC merupakan fenomena yang mewarnai dan membentuk konfigurasi perekonomian global. Penyebaran TNC ke seluruh dunia didorong oleh motif mengejar keuntungan global, memperoleh suplai bahan mentah, melayani pasar secara langsung, meminimumkan biaya, dan mengikuti tahap evolutif dalam internasionalisasi bisnis, dan didukung oleh kemampuan memindah uang dan keuntungan dari perusahaan afliasinya.

Ketiga, terjadinya pergeseran kekuatan ekonomi global yang memunculkan tiga mega market ekonomi dunia: (i) Uni Eropa, (ii) Amerika Utara, (iii) Asia Timur dan Tenggara. Produksi dan perdagangan global didominasi oleh tiga kawasan ini, yaitu menghasilkan 70% ekspor dunia dan 62% produk manufaktur dunia; dan sebagai sumber dan penerima investasi internasional (Abimanyu, 1995:20).

Praktek neoliberalisme di Indonesia

Perubahan kekuasaan di Indonesia yang terjadi bulan Mei 1998 tidak dapat ditolak merupakan implikasi ketidakmampuan Orde Baru mengatasi krisis ekonomi dan politik - yang dimulai sekitar pertengahan 1997- sebagai derivasi krisis moneter di Asia Timur dan Tenggara. Kekuatan Orde Baru yang begitu dominan secara ekonomi terhadap kekuatan modal internasional dimulai selama dekade 1970-an akibat naiknya harga minyak bumi.

Pada masa itu bermunculan kelas kapitalis yang dibentuk dan dikontrol negara, yang sebagian besar terdiri dari para kerabat para birokrat. Strategi ekonomi yang dikembangkan saat itu adalah Industri Substitusi Impor (ISI) yang sangat tidak cocok dengan penetrasi kapitalisme global yang tampil dalam strategi Industri Orientasi Ekspor (IOE). Kejatuhan harga minyak di awal dekade 1980-an menyebabkan negara mengubah strategi ISI -yang menciptakan *high cost economy*- ke IOE yang berimplikasi semakin terbukanya Indonesia bagi investasi modal asing yang artinya pasar semakin diliberalkan.

nasionalis, seperti terminologi ekonomi Pancasila, demokrasi Pancasila, dan sebagainya.

Praktek ekonomi neoliberalisme di Indonesia

Pergantian kekuasaan ternyata tidak mampu mengatasi krisis ekonomi. Ekonomi Indonesia pada masa lalu ditopang tiga tonggak penting. Tonggak pertama, yaitu stabilitas politik yang didukung oleh ABRI/TNI. Tonggak kedua, konsep pembangunan ekonomi yang dipercayakan kepada sekelompok teknokrat. Tonggak ketiga, dibukanya “hubungan baik” dengan negara-negara dan lembaga-lembaga kapitalis internasional, seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF).

Pada saat ekonomi Indonesia mengalami guncangan yang hebat sebagai akibat krisis ekonomi, maka pemerintah meminta bantuan dari lembaga-lemba keuangan internasional, baik IMF, Bank Dunia, maupun CGI. Bantuan yang diberikan oleh negara kapitalis, lewat IMF (International Monetary Found), tidak sekedar memberikan bantuan, tetapi mereka juga memberikan “paket reformasi” yang harus dijalankan pemerintah Indonesia. Paket reformasi ini adalah suatu kebijakan yang harus dijalankan pemerintah, yang sebetulnya merupakan strategi ekonomi **neoliberalisme**, yaitu strategi untuk membangun ekonomi global yang benar-benar lepas dari campur tangan negara atau ekonomi pasar bebas. Beberapa kemungkinan mengapa negara kapitalis mau memberikan bantuan dana melalui lembaga keuangan internasional kepada negara yang terkena krisis ekonomi adalah sebagai berikut:

- Tingginya kurs mata uang beberapa negara-negara kapitalis menyebabkan negara yang mempunyai hutang akan akan membayar berlipat ganda.
- Jatuhnya nilai mata uang Indonesia dan negara Asia lainnya, berarti secara otomatis akan membuat nilai tukar mata uang negara kapitalis internasional berlipat. Sebagai hasilnya dapat membeli produk Indonesia lebih murah.
- Membuka kesempatan bagi negara kapitalis untuk membeli perusahaan-perusahaan dalam nilai yang lebih rendah. Hal ini dapat kita lihat dari dikeluarkanya kebijaksanaan privatisasi beberapa

Proses industrialisasi di dunia ketiga sangat ditentukan negara melalui strategi substitusi impor. Strategi substitusi impor ini sendiri sangat kondusif menciptakan distorsi pada kapitalisme berupa proteksi dan monopoli di tangan negara. Negara yang sangat kuat ini kemudian memiliki kemampuan untuk membentuk dan menentukan gerak akumulasi modal, misalnya dengan membentuk kapitalis kroni yang didasari pada nepotisme dan bukan karena kemampuan enterprenur sejati. Negara kemudian juga mampu meredam dan mengontrol gerakan sosial yang dilakukan *civil society*. Namun di lain pihak rezim dunia ketiga berada dalam posisi yang subordinat terhadap negara kapitalis maju. Hal ini nampak pada ketergantungan terhadap modal asing sehingga posisi politiknya menjadi lemah. Sementara itu kebijakan ekonomi yang dilakukan nampak menghambat arus penetrasi modal dari negara industri maju.

Praktek-praktek korupsi, kebijakan proteksi, program subsidi atas berbagai komoditas, hingga pemberian fasilitas istimewa kesemuanya itu melawan logika/etik kapitalisme seperti praktek kompetisi dan persaingan bebas melalui ekonomi pasar. Selain itu kapitalisme mengharamkan bentuk intervensi negara yang berlebihan dalam tindakan ekonomi. Akibatnya yang terjadi adalah stagnasi dalam pembangunan (*development*) yang diikuti krisis ekonomi. Krisis (ekonomi) ini kemudian mendorong terjadinya restrukturisasi rezim supaya bisa mengintegrasikannya ke sistem kapitalisme dunia yang didasari pada *free fight liberalism*. Hampir semua pengkritik kebijakan rezim di dunia ketiga adalah kegagalannya dalam menerapkan sistem kapitalis yang tulus seperti yang dijalankan di negara kapitalis maju. Sementara kritik terhadap kapitalisme sebagai sistem yang eksploitatif terlepas perbedaan penerapannya di negeri industri maju dan dunia ketiga kurang bergaung.

Pembedaannya tentu saja pada keyakinan apakah dengan negeri dunia ketiga menerapkan mekanisme ekonomi pasar dan menganut etika kapitalisme maka persoalan masyarakat akan beres seperti yang secara fantastis diramalkan Fukuyama bahwa sistem kapitalisme merupakan "*The End of History*". Ataukah seperti yang dipaparkan dengan gigih dan tak kenal menyerah dari kaum Marxist yang menyatakan kapitalisme

Bab 8

Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)



Pendahuluan

Masalah lingkungan hidup (*environmental problems*) tengah menjadi isu global terutama dua dekade terakhir sehingga baik pemerintah maupun masyarakat di negara-negara maju maupun negara-negara sedang berkembang telah dan terus memberikan perhatian yang serius pada masalah tersebut. Dunia makin menyadari bahwa eksploitasi sumber daya alam (*natural resources*) yang hanya berorientasi ekonomi tidak hanya membawa efek yang positif tetapi juga menimbulkan efek yang negatif bagi umat manusia. Dengan demikian, arah dan strategi pembangunan ekonomi kini dan yang akan datang harus diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan atau pembangunan yang berwawasan lingkungan yaitu pembangunan tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek etika dan sosial yang berkaitan dengan kelestarian kemampuan daya dukung sumberdaya alam (lingkungan) antar waktu. Masalah lingkungan timbul karena adanya interaksi antara aktivitas ekonomi dan eksistensi sumberdaya alam (SDA). Semakin besar jumlah dan intensitas eksploitasi SDA itu, dampaknya terhadap degradasi kualitas lingkungan (*environmental degradation*) juga cenderung meningkat.

dalam hubungan manusia dan alam (*nature*) atau lebih spesifik lagi antara masyarakat dan lingkungan fisiknya. Pada sisi lainnya pembangunan merupakan proses perubahan yang terus-menerus yang ditandai antara lain melalui kegiatan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, sebagai modal untuk memenuhi kesejahteraan materi. Dalam konsep *sustainable development*, kedua aspek ini harus berjalan secara harmonis dan terpadu, dan memperoleh perhatian yang sama dalam kebijaksanaan pembangunan.

Secara historis, konsep *sustainable development* muncul pertama kali sebagai upaya untuk mengatasi bahaya polusi pada akhir 60-an dan permulaan 70-an yang merupakan kekhawatiran bangsa Barat akibat dampak negatif dari perkembangan industri yang pesat. Namun lambat laun dampak tersebut akan merembes juga ke negara-negara sedang berkembang. Alasan inilah yang melahirkan konferensi Stockholm tahun 1972. Setelah konferensi tersebut dibentuklah *The First Governing Council* sebagai inti dari sebuah badan UNO yang baru yang dikenal sebagai *The United Nation Environmental Programme* (UNEP) di Nairobi. Yang menjadi perhatian utama adalah lingkungan fisik global (*the global physical environment*), baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang.

Konsep dasar *sustainable development* berangkat dari gagasan bahwa sumberdaya itu terbatas dalam memenuhi kebutuhan manusia (*human needs*) yang cenderung tidak terbatas sehingga perlu dilestarikan dan dipelihara supaya bisa dimanfaatkan baik untuk generasi kini maupun generasi yang akan datang. Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan yang ingin menyelaraskan antara aktivitas ekonomi dan ketersediaan sumberdaya alam. Konsep pembangunan seperti ini tidak hanya memperhatikan kepentingan generasi kini tapi juga generasi yang akan datang (*inter-generational approach*).

Dalam perkembangannya, konsep ini telah melahirkan pemikiran yang cukup bervariasi sesuai dengan konteks dan kepentingan tertentu. Secara umum konsep ini mengacu kepada bagaimana mengharmoniskan dua kepentingan, pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dan sumberdaya. Bahkan oleh Redclift (1991) berpendapat bahwa konsep

1. diintegrasikan dari permulaan proses pengambilan keputusan/ perumusan kebijakan,
2. masalah lingkungan adalah saling terkait satu sama lain,
3. problema ekonomi dan lingkungan berkaitan dengan banyak faktor sosial dan politik, dan
4. faktor-faktor ekonomi, polusi dan ekosistem tidak memandang batas-batas negara yang mengakibatkan pentingnya kerja sama dan komunikasi internasional.

Tietenberg (1992) berpendapat bahwa sumberdaya harus dialokasi secara efisien yang dinamis (*dynamic efficient allocations*). Pendekatan ini dianggap konsisten dengan konsep sustainabilitas karena keuntungan bisa dibagi secara adil antar generasi. Konsep sustainabilitas lebih menekankan aspek keadilan (*fairness*) antar generasi daripada efisiensi lokal. Oleh karena itu, institusi-institusi sosial dan ekonomi harus mampu memproduksi hasil yang efisien dan *sustainable*.

Dari konsep dan definisi-definisi diatas dengan jelas menunjukkan bahwa *sustainable development* merupakan suatu konsep yang sangat kompleks terutama dalam aplikasinya. Perwujudan sistem pembangunan seperti itu, perlu pendekatan yang komprehensif tidak hanya di tingkat lokal tapi juga global. Berkembangnya globalisasi dunia diberbagai bidang, membuat ketergantungan dan keterkaitan antar umat manusia menjadi semakin besar. Masalah internal suatu negara, telah beralih menjadi masalah dunia, tak terlepas masalah lingkungan tersebut. Globalisasi ternyata tidak hanya globalisasi ekonomi, sosial, budaya dan komunikasi yang positif tetapi juga globalisasi dampak lingkungan.

Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Menindaklanjuti publikasi Our Common Future, banyak upaya telah dilakukan untuk mengembangkan pedoman dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini dengan pertimbangan bahwa tanpa pedoman atau prinsip, tidak mungkin menentukan apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan sustainable, atau apakah suatu prakarsa konsisten dengan sustainable development.

- Dari kriteria sosio-politik
 1. menerapkan proses politik yang terbuka dan mudah dicapai, yang meletakkan kekuatan pembuatan keputusan secara efektif oleh pemerintah pada tingkat yang paling dekat dengan situasi dan kehidupan masyarakat yang terkena akibat dari keputusan tersebut;
 2. meyakinkan masyarakat bebas dari tekanan ekonomi;
 3. meyakinkan masyarakat dapat berpartisipasi secara kreatif dan langsung dalam sistem politik dan ekonomi;
 4. meyakinkan tingkat minimal dari pemerataan (*equality*) dan keadilan sosial, termasuk pemerataan untuk merealisasikan potensi penuh sebagai manusia, sumberdaya untuk sistem legal yang terbuka, bebas dari represi politik, akses ke pendidikan dengan kualitas tinggi, akses yang efektif untuk mendapat informasi, dan kebebasan beragama, berbicara dan bertindak.

Implikasi Sustainable Development

Masalah lingkungan adalah masalah yang sangat kompleks yang membutuhkan keterlibatan semua pihak baik pemerintah dengan seluruh perangkat yang terkait, pihak swasta dan atau pelaku ekonomi, serta masyarakat luas atau konsumen.

Indonesia telah mempunyai komitmen yang sangat lama tentang konsep perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Namun perhatian ini mulai sangat menonjol pada awal tahun 1970-an. Ini ditandai oleh beberapa tindakan pemerintah:

1. Komitmen Indonesia pada Konferensi Lingkungan Hidup (*Conference on the Living Environment*) yang diadakan di Stockholm tahun 1972.
2. GBHN tahun 1973 yang menekankan bahwa eksploitasi sumberdaya alam harus dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang komprehensif yang mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang.
3. Pemerintah membentuk suatu Komite Penyusunan Kebijakan Lingkungan (*a Committee for the Formulation of Environmental*

1. Program Kali bersih-PROKASIH (*clean river programme*) tahun 1989. Sebagai usaha bersama dengan pemerintah daerah (DKI) untuk mengatasi polusi industri yang mencemari sungai-sungai.
2. Program Adipura yang menilai kota dari segi lingkungan (kebersihan) dan faktor-faktor terkait pada tahun 1989.
3. Pada tahun 1996 pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan Keputusan nomor 16/MENLH/4/1996 yang mengatur tentang program Langit Biru. Program ini mewajibkan kalangan industri untuk menandatangani surat kesediaan untuk memasang alat penurun kadar polutan gas buangan pabrik.

Gerakan lingkungan di Indonesia diperkuat lagi, dengan munculnya berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan yang berada di bawah naungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang didirikan pada tahun 1980.

Faktor penentu pelaksanaan

Penanganan masalah lingkungan membutuhkan keterlibatan semua pihak baik pemerintah dengan seluruh perangkat terkait, pihak swasta atau pelaku ekonomi, serta masyarakat luas atau konsumen. Perlu keterpaduan dan kebersamaan dalam mensukseskan pelaksanaan *sustainable development* dari semua unsur tersebut. Selain itu, kajian lingkungan itu sendiri perlu pula melibatkan berbagai ahli (multidisipliner) baik dari sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan politik.

Kehendak Politik Pemerintah

Perbenturan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan kadang sulit bagi pemerintah untuk menerapkan konsep yang berwawasan lingkungan ini. Kehendak politik pemerintah tidak hanya dengan pernyataan dan simbol politik saja melainkan direalisasikan dalam kebijaksanaan dan ketertiban dalam pelaksanaannya. Institusi-institusi yang menangani serius masalah lingkungan harus diwujudkan, serta aturan-aturan dan tindakan-tindakan hukum bagi perusak lingkungan harus disusun dan dikeluarkan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Masalah politik

Peranan sektor industri

Walaupun strategi dan kebijaksanaan lingkungan lebih diarahkan untuk sektor produsen dan kadang tidak menguntungkan secara ekonomi, dukungan pelaku ekonomi produsen adalah salah satu kunci utama dalam kesuksesan pembangunan berkelanjutan.

Masalah lingkungan timbul karena aktivitas ekonomi selama ini belum memperhitungkan biaya lingkungan atau sosial sebagai dampak dari aktivitasnya. Limbah industri dan pertanian misalnya memberikan kontribusi penting terhadap masalah lingkungan.

Peranan media massa

Media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi tetapi sekaligus bisa merubah opini masyarakat tentang masalah lingkungan. Sadar lingkungan merupakan kunci penting tentang partisipasi aktif masyarakat dalam menangani masalah lingkungan. Pemberitaan tentang masalah lingkungan serta masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaannya, pelanggaran, serta proses pelaksanaan kebijaksanaannya, akan efektif bagi peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat

Kesadaran masyarakat umum akan lingkungan merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Kesadaran ini mulai tumbuh kalau masyarakat sudah merasakan pentingnya lingkungan sebagai aset dan konsumsi yang berharga. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengendalian masalah lingkungan perlu upaya yang terarah dan berkesinambungan. Usaha peningkatan partisipasi masyarakat bisa diupayakan dengan berbagai cara terutama untuk meningkatkan pengetahuannya tentang serta dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia.

antara pertanian dan industri. Puncak prosesnya adalah hancurnya sistem komunis. Semuanya makin dikenalnya manusia sebagai *human being*. Masalah keterbukaan, demokratisasi serta hak asasi manusia, bahkan lingkungan hidup yang melanda dunia tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk memanusiaikan kembali manusia tersebut.

Berbagai teori menjelaskan keterkaitan antara pengembangan sumber daya manusia, aplikasi teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Kaum neoklasik yang diprakarsai oleh Solow (1957) berpendapat bahwa teknologi dapat dianggap sebagai faktor yang bersifat eksogen yaitu datang begitu saja (dari luar sistem) ke dalam proses produksi. Siapapun dan negara manapun mempunyai kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi tersebut dengan pengeluaran rendah dan atau bahkan tanpa biaya sama sekali. Di dalam perekonomian yang terbuka, hampir semua faktor produksi dapat berpindah secara leluasa dan teknologi dapat dimanfaatkan oleh setiap negara maka pertumbuhan semua negara di dunia akan konvergen atau kesenjangan berkurang.

Konvergensi yang diharapkan tidak terjadi, namun sebaliknya yang terjadi adalah kesenjangan makin melebar antara negara maju dan negara berkembang. Maka berkembang pola pikir pertumbuhan endogen yaitu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan serta dinamika ekonomi bersumber dari dalam. Unsur dalam ini mewujudkan diri dalam efisiensi dan produktivitas masyarakat. Makin besar produktivitas sebagai sumber pertumbuhan maka makin besar pula unsur pembangunan dari dalam.

Sumber pertumbuhan dalam teori endogen dikemukakan oleh Romer (1960) yaitu meningkatkan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan manusia. Dalam proses produksi, keberhasilan pembangunan akan ditentukan oleh proses akumulasi dari kualitas sumber daya manusia (Becker, Murphy, dan Tamura, 1990).

Banyak studi empiris dilakukan untuk melihat kaitan antara kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan. Denilson (1962) misalnya menemukan adanya sumbangan yang besar dari peningkatan *years of schooling* terhadap pertumbuhan di Amerika Serikat. Barro (1991) serta Mankiw, Romer dan Weil (1992) menyatakan bahwa partisipasi pendidikan dan investasi yang cukup besar untuk pendidikan pada

Abdurrahman Wahid, berkumpul di *United Nation Millennium Summit* di New York dan menandatangani Deklarasi Milenium. Deklarasi itu menegaskan kembali komitmen negara-negara yang ikut dalam summit dan masyarakat internasional untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium, yaitu serangkaian tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pemberantasan kemiskinan.

Millenium Development Goals (MDGs) pada dasarnya mewujudkan komitmen internasional yang dibuat di *United Nation Summit* dan konferensi global sepanjang tahun 1990-an. Dengan menandatangani Deklarasi Milenium para pemimpin dunia berjanji untuk mengurangi proporsi orang yang menderita kelaparan, memastikan bahwa semua anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar, mengeliminasi perbedaan jender di semua tingkat pendidikan, mengurangi tingkat kematian balita hingga dua pertiga, dan mengurangi proporsi penduduk yang tidak memiliki akses terhadap sumber air secara bertahap pada tahun 2015.

Dalam rangka mewujudkan hal ini, kemudian dirumuskan 8 (delapan) Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*). Dalam setiap tujuan terkandung "target-target" yang spesifik dan terukur. Terkait perbaikan posisi perempuan, misalnya, ditargetkan kesetaraan jumlah anak perempuan dan laki-laki yang bersekolah. Begitu pula berapa banyak perempuan yang bekerja atau yang duduk dalam parlemen. Delapan tujuan umum tersebut, mencakup kemiskinan, pendidikan, kesetaraan gender, angka kematian bayi, kesehatan ibu, beberapa penyakit (menular) utama, lingkungan serta permasalahan global terkait perdagangan, bantuan dan utang.

Deklarasi itu berdasarkan pendekatan yang inklusif, dan berpijak pada perhatian bagi pemenuhan hak-hak dasar manusia. Dalam konteks inilah negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). Setiap tujuan (goal) memiliki satu atau beberapa target. Target yang tercakup dalam MDGs sangat beragam, mulai dari mengurangi kemiskinan dan kelaparan, menuntaskan tingkat pendidikan dasar, mempromosikan kesamaan gender, mengurangi kematian anak dan ibu, mengatasi HIV/AIDS dan berbagai penyakit lainnya, serta memastikan

paran hingga setengahnya

- Jumlah balita dengan berat badan di bawah normal;
- Proporsi penduduk yang mengkonsumsi nilai gizi kalori di bawah standar minimum.

1.2 Tujuan 2 : Mencapai pendidikan dasar untuk semua

a. Indikator

- 1) Target 2a: Memastikan anak laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar.
 - Netto jumlah pendaftaran pendidikan dasar;
 - Proporsi pelajar yang menyelesaikan pendidikan dari Kelas 1 hingga kelas akhir di pendidikan dasar;
 - Tingkat kemampuan baca-tulis laki-laki dan perempuan usia 15-24 tahun.

1.3 Tujuan 3 : Memajukan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan

UNDP bekerja dengan dan berpihak kepada wanita dalam advokasi kebijakan, perkembangan kapasitas wanita dan mendukung rancangan kesetaraan gender dengan berkolaborasi dengan UNIFEM.

a. Indikator

- 1) Target 3a: Menghapus ketimpangan gender di tingkat pendidikan sekolah dasar dan menengah pada tahun 2005, dan pada semua tingkat pendidikan pada tahun 2015.
 - Rasio anak laki-laki dengan anak perempuan yang mengenyam pendidikan tingkat dasar, menengah dan lanjut;
 - Proporsi dari wanita sebagai pekerja upahan di sektor non-pertanian;
 - Proporsi perwakilan wanita dalam parlemen nasional.

- pengetahuan tentang HIV/AIDS yang komprehensif dan tepat;
- Rasio kehadiran di sekolah antara yatim piatu dengan bukan-yatim piatu berusia 10-14 tahun.
- 2) Target 6b : Dicapainya akses perawatan secara merata dan universal bagi penderita HIV/AIDS pada tahun 2010
- Proporsi dari populasi menderita infeksi HIV tingkat lanjut yang mempunyai akses kepada pengobatan antiretroviral
- 3) Target 6c : Menghentikan dan menurunkan kecenderungan penyebaran malaria dan penyakit menular lainnya
- Jumlah insiden dan angka kematian karena Malaria;
 - Proporsi balita yang tidur menggunakan tirai ranjang yang sudah mengandung insektisida;
 - Proporsi balita yang menderita demam dan dirawat dengan obat-obatan anti-malaria yang tepat;
 - Jumlah insiden, eksistensi umum, angka kematian karena tuberkulosa;
 - Proporsi penyakit tuberkulosis (TBC) yang terdeteksi dan terobat dibawah supervisi langsung perawatan jangka pendek.

1.7 Tujuan 7 : Memastikan kelestarian lingkungan

a. Indikator

- 1) Target 7a : Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program Negara; serta mengembalikan sumber daya alam yang hilang.
- 2) Target 7b : Mengurangi kadar hilangnya keragaman alam dan menurunkan tingginya kadar kehilangan tersebut secara signifikan pada tahun 2010.
- Proporsi dari dataran hutan;
 - Total emisi CO₂, per kapita dan per \$1 GDP (PPP);
 - Konsumsi bahan perusak ozon;
 - Proporsi dari jumlah ikan dalam batasan aman lingkup hayati;

- 4) Target 8d : Menangani hutang negara berkembang melalui upaya nasional maupun Internasional agar pengelolaan hutang berkesinambungan dalam jangka panjang. Beberapa dari indikator di bawah ini dimonitor secara terpisah bagi negara paling tertinggal, Afrika, Negara Daratan dan Negara Kepulauan Kecil. Pembiayaan pembangunan (*Official Development Assistance*, atau ODA).
- Netto dari ODA, total dan untuk Negara paling tertinggal, sebagai persentasi dari pendapatan nasional bruto donor OECD/DAC.
 - Proporsi dari total bilateral, alokasi sektor dari donor OECD/DAC untuk pelayanan kesejahteraan pokok (pendidikan dasar, perawatan kesehatan pokok, nutrisi, air bersih dan sanitasi).
 - Proporsi dari bantuan bilateral resmi tidak terikat yang diberikan oleh donor OECD/DAC.
 - ODA yang diterima oleh Negara daratan sebagai proporsi dari produk nasional bruto Negara tersebut.
 - ODA yang diterima oleh Negara kepulauan kecil sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto Negara tersebut.
 - Akses pasar, Proporsi dari total impor Negara maju (dalam nilai dan tidak termasuk barang senjata) dari negara berkembang dan paling tertinggal yang bebas bea cukai.
 - Tarif rata-rata yang dibebankan oleh Negara maju untuk produk pertanian, tekstil dan pakaian dari Negara berkembang.
 - Perkiraan bantuan di bidang pertanian sebagai persentasi dari produk nasional bruto.
 - Proporsi dari ODA yang tersedia untuk membantu pertumbuhan kapasitas perdagangan.
 - Pengelolaan hutang, jumlah negara yang telah melaksanakan butir keputusan dan memenuhi komitmen HIPC (secara kumulatif).
 - Keringanan hutang sebagai tertuang dalam inisiatif HIPC dan MDRI.

pilihan manusia yang lebih berfungsi untuk memperdayakan manusia itu sendiri seperti pilihan harapan hidup, hidup secara sehat, mempunyai tingkat pendidikan yang baik, dan mendapatkan perangkat-perangkat lain yang berfungsi untuk memperoleh standard hidup yang layak. Pilihan-pilihan itu juga termasuk kebebasan berpolitik, jaminan hak asasi dan kemampuan pribadi (*personal self respect*).

Teori-teori yang mendukung bagi pembangunan (Moeljarto, 1995) yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia diungkapkan oleh tokoh-tokoh seperti Denis Goulet (1973), dan Ivan Illich (1973). Meskipun variasi di antara tokoh yang satu dengan yang lain cukup tajam namun kesemuanya memperjuangkan penghormatan terhadap eksistensi manusia.

Ivan Illich misalnya mengemukakan konsep keseimbangan multidimensional dalam kehidupan manusia yang dapat dijadikan kerangka untuk menilai hubungan manusia. Dia menganalisis bahwa proses pembangunan yang di satu pihak mengantarkan manusia pada masyarakat industri, tetapi di lain pihak menciptakan teknologi dan alat dalam arti luas membelenggu kebebasan individu. Dia mengusulkan agar manusia mampu melindungi hak dan kekuasaan individu, dan manusia dapat memilih gaya hidupnya sendiri yang sesuai dengan standar kehidupan yang layak.

Penganut ide pembangunan berwajah manusiawi lainnya adalah Denis Goulet yang menginterpretasikan pembangunan ekonomi dari nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya gejala pembangunan dan keterbelakangan (*underdevelopment*) bukanlah semata-mata masalah ekonomi ataupun pengukuran pendapatan dan pengangguran. Pembangunan menurut Denis Goulet mempunyai tiga komponen utama yaitu kelangsungan hidup (*life sustenance*), kehormatan diri (*self-esteem*) dan kebebasan (*freedom*). Segi ekonomi tercermin dari konsep 'kelangsungan hidup' dimana pembangunan harus berusaha memenuhi kebutuhan sebanyak mungkin orang baik berupa pangan, perumahan, kesehatan dan perlindungan karena semuanya merupakan prasyarat bagi tercapainya kehidupan yang layak.

Komponen ketiga pembangunan yang diusulkan oleh Denis Goulet adalah kebebasan dalam arti yang fundamental yang meliputi hak hidup

dimensi dari pilihan-pilihan manusia seperti harapan hidup, pendidikan, pendapatan dan lain sebagainya. Menurut laporan UNDP tahun 1996 yang memasukkan 174 negara Indonesia masuk ke peringkat 102 dengan indeks 0,641. Korea Selatan dengan indeks 0,886 dan Cina pada peringkat 108 dengan indeks 0,609.

Keterkaitan *Good Governance* dan *Human Development*

Setelah pembangunan *Human Development* bergerak dalam bidang *social needs* yang berujud pelayanan-pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan pelayanan lain, kemudian beralih ke *politics needs* yaitu kebebasan berkelompok atau berorganisasi, mengeluarkan pendapat dan bebas berpolitik. Proses *human development* terus berevolutif sampai ke sektor *government* yang menuntut adanya *good governance* untuk mendukung pembangunan manusia.

Isunya adalah sumberdaya yang diperlukan untuk menopang dan mengembangkan kualitas hidup memang harus dikelola dengan baik, dimanfaatkan dan dialokasikan secara bijaksana. Kondisi yang demikian itu hanya dapat dicapai apabila ada pemerintahan (*governance*) yang mempunyai kemampuan yang memadai, yang mampu memadukan kekuatan sektor pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil.

Oleh Mahathir dan Ishibara, 1995 menyatakan bahwa kekayaan sumber daya alam dan penduduk kecil tidak menjamin perkembangan dan kemajuan. Keberhasilan pembangunan tergantung pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), administrasi yang terorganisasikan dengan rapi dengan cita-cita ke depan yang jelas.

Kepemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik bukan hanya pemerintahan yang harus baik tetapi secara keseluruhan *stakeholder* yang terlibat, harus mempunyai kapasitas yang memadai. Kapasitas-kapasitas tersebut (*UNDP, Governance Policy Paper, 1999*) adalah:

- Pemerintah harus mempunyai kemampuan untuk mewadahi proses politik atau pengambilan keputusan tentang norma dan kebijakan dan mengimplementasikan melalui regulasi dan proses birokrasi

perspektif yang luas dan jauh tentang pemerintah yang baik, pengembangan manusia dan kebersamaan dan mempunyai kepekaan atas apa yang diperlukan untuk pembangunan.

Kritik atas Human Development

Pemusatan perhatian pada manusia banyak ditentang dari para *deep ecology* yang mengkhawatirkan bahwa pandangan tersebut akan mendorong eksploitasi alam dengan semena-mena. Walaupun, pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian ini lebih banyak diterima dan menjadi ideologi penyelenggaraan pembangunan. Alasannya karena manusia dengan basis pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dianggap sudah jauh lebih memahami proses dan fungsi alam sebagai komponen sistem kehidupan (arogansi manusia). Di lain pihak jumlah manusia yang tidak berdaya, yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan gizi dan tidak mampu mengikuti perkembangan yang terjadi jumlahnya masih sangat besar. Masyarakat yang tertinggal ini perlu diperhatikan karena berpotensi menimbulkan pertikaian, menghambat berfungsinya sistem ekonomi dan membatasi kemampuan untuk mengatasi dan mencegah kemerosotan daya dukung alam. Oleh karena itu pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada manusia harus diartikan sebagai pemberdayaan manusia dan masyarakat yang tidak mampu dalam arti luas.

Pembangunan manusia harus didukung dengan kekuatan dana yang tidak sedikit. Kebanyakan negara-negara berkembang sulit menerapkan pembangunan pada unsur ini. Mereka lebih senang meningkatkan pertumbuhan ekonomi daripada unsur manusianya sendiri. Eksploitasi sumberdaya alam begitu besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pada negara-negara tersebut. Akibatnya banyak dimanfaatkan oleh negara-negara maju menangkap peluang ini, dengan menyerap sumberdaya ini sebanyak-banyaknya untuk dibawa ke negara maju. Negara yang lemah dalam *human development* akan menjadi tempat eksploitasi bagi negara maju yang sadar betul pembangunan *human development*.

Human development harus didukung dengan sektor-sektor yang lain. Pembangunan manusia menuntut keberlangsungan tidak bisa lepas

Mekanisme pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada kemampuan keuangan pemerintah pusat telah mengakibatkan terlalainya upaya-upaya untuk menggali dan menghimpun potensi masyarakat setempat. Pembangunan masyarakat yang demikian justru memperbesar ketergantungan masyarakat pada uluran tangan pemerintah dan pada hakekatnya mengakibatkan penurunan potensi manusia.

Pembangunan yang berpusat pada manusia

Konsep *pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia* merupakan amanat yang tercantum dalam GBHN pada hakekatnya cukup memberi tempat sesuai dengan hakiki manusia dan menempatkan manusia pada posisi sentral. Adanya kesenjangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat pada dasarnya lebih berkaitan pada masalah strategi daripada masalah hakiki pembangunan masyarakat. Saat gejolak global mengancam *sustainability* pembangunan nasional, maka ada relevansi untuk mempersempit kesenjangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan dimensi-dimensi lain masyarakat Indonesia, termasuk pembangunan masyarakat. Jika pembangunan ekonomi dengan pembangunan bidang-bidang lain termasuk pembangunan masyarakat dapat bersinergi akan mewujudkan *sustained development*, memperkecil benturan-benturan yang terjadi.

Pembangunan manusia harus diartikan sebagai pembangunan untuk mewujudkan *self sustaining capacity* masyarakat sendiri. Pembangunan yang berpusat pada manusia (*people-centered development*) memandang manusia sebagai fokus utama maupun sumber utama pembangunan. Selain akan dapat mengubah peranan masyarakat sebagai penerima pasif pelayanan pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok menjadi anggota masyarakat yang mampu berperan serta aktif di dalam pembangunan.

Strategi pembangunan yang berpusat pada manusia, mempunyai perbedaan yang fundamental di dalam karakteristiknya dasarnya dibandingkan dengan strategi kebutuhan pokok yang selama ini lebih mendominasi proses pembangunan di Indonesia. Matriks di bawah ini mengungkapkan perbedaan tersebut:

pertumbuhan, pemerataan, *basic needs*, partisipasi dan lain-lain. Krisis utang pada negara Indonesia karena dana pinjaman tersebut tidak dipergunakan untuk membiayai investasi yang berulang-ulang untuk program-program yang tidak *sustainable*.

Pembangunan masyarakat yang berpusat pada sumber daya manusia dengan pendekatannya berupa pengelolaan sumberdaya yang bertumpu pada komunitas, diharapkan ikut mewujudkan *sustained development*. namun hal ini tidak mudah karena menyangkut reformasi struktur, reorientasi nilai, dan perubahan sikap dan perilaku birokrasi dan masyarakat.

strategi pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan ekonomi diberi batasan sebagai suatu tindakan pemilihan atas faktor-faktor (*variable*) yang akan dijadikan factor/variable utama yang menjadi penentu jalannya proses pertumbuhan (Suroso, 1993). Beberapa strategi pembangunan ekonomi yang dapat disampaikan adalah :

Strategi Pembangunan Ekonomi

Strategi pertumbuhan

Strategi Pertumbuhan merupakan strategi pembangunan ekonomi suatu Negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akar. dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah (*trickle-down-effect*) pendistribusian kembali. Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan, hal tersebut merupakan prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi. Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah, bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.

Strategi pembangunan dengan pemerataan

Secara umum strategi Pembangunan dengan Pemerataan merupakan konsep strategi pembangunan yang menekankan pada peningkatan pembangunan melalui teknik *social engineering*, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.

Strategi ketergantungan

Strategi Ketergantungan muncul pada Tahun 1965 karena ketidak sempurnaan konsep strategi sebelumnya sehingga mendorong para ahli ekonomi mencari alternative lain.

Inti dari konsep strategi ketergantungan adalah :

- a. Kemiskinan di Negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan Negara tersebut dari pihak/Negara lainnya.

rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok, dan sejenisnya.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Strategi Pembangunan Ekonomi

Pada prinsipnya, pemilihan strategi apa yang akan digunakan dalam proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh pertanyaan 'Apa tujuan yang hendak dicapai...?'

Jika tujuan yang hendak dicapai adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, maka strategi ketergantungan-lah yang mungkin akan dipakai. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah pemerataan pembangunan, maka strategi yang berwawasan ruang-lah yang akan dipergunakan.

Strategi Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Sebelum orde baru strategi pembangunan di Indonesia secara teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pada kenyataannya nampak adanya kecenderungan lebih menitik beratkan pada tujuan-tujuan politik, dan kurang memperhatikan pembangunan ekonomi.

Strategi pembangunan era orde baru

Sedangkan pada awal orde baru, strategi pembangunan di Indonesia lebih diarahkan pada tindakan pembersihan dan perbaikan kondisi ekonomi yang mendasar, terutama usaha untuk menekan laju inflasi yang sangat tinggi (*hyper inflasi*).

Dari keterangan pemerintah yang ada, dapat sedikit disimpulkan bahwa strategi pembangunan di Indonesia tidak mengenal perbedaan strategi yang ekstrem. Sebagai contoh selain strategi pemerataan pembangunan, Indonesia pun tidak mengesampingkan strategi pertumbuhan, dan strategi yang berwawasan ruang (terbukti dengan dibaginya wilayah Indonesia dengan berbagai wilayah pembangunan I, II, III, dan seterusnya).

Strategi-strategi tersebut kemudian dipertegas dengan ditetapkannya sasaran-sasaran dan titik berat setiap Repelita, yakni :

juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidak pastian dapat dibatasi seminim mungkin.

3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternative tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.
4. Dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.
5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi.
6. Penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih efisien dan efektif. Diusahakan dihindarinya keborosan-keborosan. Suatu usaha untuk mencapai output/hasil secara maksimal dari pada sumber-sumber yang tersedia.
7. Dengan perencanaan, perkembangan ekonomi yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat ditingkatkan.
8. Dengan perencanaan dapat dicapai stabilitas ekonomi, menghadapi siklus konjungtur.

Dalam sejarah perkembangannya, perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia dibagi dalam beberapa periode, yakni :

➤ *Periode sebelum Orde baru, dibagi dalam :*

- Periode 1945-1950
- Periode 1951-1955
- Periode 1956-1960
- Periode 1961-1965

➤ *Periode setelah Orde Baru, dibagi dalam :*

- Periode 1966 s/d 1968, Periode Stabilisasi dan Rehabilitasi
- Periode Repelita I : 1969/70 - 1973/74
- Periode Repelita II : 1974/75 - 1978/79
- Periode Repelita III : 1979/80 - 1983/84
- Periode Repelita IV : 1984/85 - 1988/89

<p>Perencanaan urgensi perekonomian(1951) yg diu lkan oleh Sumitro Djojohadikusumo.</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Periode 1951 – 1955 merupakan periode paman-tapan kemer-dekaan. Kemerde-kaan Indonesia telah diakui secara Internasional te-tapi Irian Barat masih belum diserahkan oleh Belanda. ❖ Pada periode ini Indonesia mem-berlakukan UUD sementara dari 15 Agustus 1950-5 Juli 1959 yg pd dasarnya meng-gambarkan rapuh-nya persatuan di antara bangsa Indo-nesia sendiri. ❖ Rencana pem-bangunan Eko-nomi ini han-ya mencakupi waktu 1951 dan 1952. ❖ Dari tahun 1952 – 1955 tidak ada rencana pem-bangunan ekonomi yg disusun oleh pe-merintah. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tidak dirumuskan secara eks-plisit <p>Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Peningkatan nilai kemakmu-ran masyarakat dgn cara : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong ber-kembangnya industri-industri kecil. 2. Meningkatkan kemajuan badan-badan koperasi dan memperkuat organisasi-or-ganisasi dan perkumpulan-perkumpulan untuk usaha perniagaan kecil dan menen-gah. 3. Mendorong ber-kembang-nya industry berat yang akan menjadi unsure-unsur pe-nyokong yang memudahkan dan memperkuat kemajuan perindustrian dalam negeri di daerah-daerah. 4. Peranan pemerintah diharap-kan dominan dalam pelaksa-nan rencana ini. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Perang Korea pada tahun 1951 yang men-gakibatkan penerimaan Indonesia men-ing-kat sehingga relatif ada dana (dikenal dengan istilah Korea – Boom) <p>Yang Menghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Inflasi yang tidak dapat dikendalikan se-bagai akibat defisit Anggaran yg semakin mening-kat ❖ Penggunaan sur-plus perdagangan yang tidak terarah. ❖ Kebijakanana ke-uangan yg tidak men-dorong ber-kembangnya in-vestasi. ❖ Kabinet masih silih berganti yang men-gakibatkan tidak adanya rencana/ pro-gram yg ber-kesinambungan. ❖ Sifat rencana yang sangat pendek (hanya 2 thn) dan tidak mempunyai dasar politik (tidak ada persetujuan DPR).
3. Periode 1956 – 1960	Landasan :	Yang mendukung :
<p>Rencana Pemba-ngunan Lima Tahun Pertama (RTLTP) 1956 – 1960.</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Dalam periode ini kabinet masih silih ber-ganti. ❖ Sengketa Irian Barat yg semakin meningkat yg mengakibatkan di-nasionalisasikan perus-sahaan-perusahaan Belanda. ❖ Perkembangan politik di dalam negeri se-makin panas yg menga-kiatkan perekono- 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Secara eksplisit tidak diru-muskan. <p>Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan pendapatan masyarakat dgn menga-lokasikan dana tahunan seba-gai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pertanian, peternakan, peri-kanan, & kehutanan... .13% 2. Untuk pengairan dan proyek-proyek multi purpose ...25% 3. Untuk alat-alat per-hubun- 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Secara politis Rencana Undang-Undang tentang RLTP ini telah disetujui oleh DPR <p>Yang menghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Dalam pelak-sanaan ternyata garis-garis besar rencana itu perlu dirubah, baik da-lam target maupun dalam pembiayaan. ❖ Rencana yg di-susun tidak/ kurang mem-per-hatikan potensi yang ada. ❖ Inflasi yg semakin tidak terkendali sebagai akibat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang semakin besar. ❖ Pendapatan peme-rintah dari eksport sangat menurun sebagai akibat dari resesi ekonomi yg dialami Amerika Serikat dan Eropa Barat selama akhir 1957 dan per-

<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Dgn pemberontakan PKI thn 1965, Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana praktis tidak berlaku lagi. ❖ Setelah pemberontakan PKI di-tumpas, lahir masa Orde Baru. ❖ U11 Perbankan thn 1968 diberlakukan. ❖ Kebijakan 3 Oktober 1966 yg mengambil langkah-langkah di bidang keuangan Negara, moneter & perdagangan yang berkisar pada : <ul style="list-style-type: none"> - Penertiban keuangan Negara yang serba sulit pengaturan kembali urusan moneter & dunia perbankan. - Memberikan kebebasan kepada dunia perdagangan yg terbelenggu oleh sistem jatah yg tidak wajar dan oleh peraturan berbelit-belit yg mematika inisiatif rakyat/masya. ❖ Kebijakan ini berintikan bertujuan mem-bendung laju inflasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kembali dari pada semua landasan-landasan kebijaksanaan ekonomi, keuangan & pembangunan agar diperoleh keseimbangan yg tepat antara upaya yg diusahakan & tjuan yg hendak dicapai. 2. Melaksanakan UUD 1945 secara murni & konsekuen. 3. Stabilitas & rehabilitasi yg mencakup : (jangka pendek), pengendalian inflasi : <ul style="list-style-type: none"> - pencukupan kebutuhan pangan; - rehabilitasi pra-sarana ekonomi; - peningkatan kegiatan ekspor; - pencukupan kebutuhan sandang. ❖ Pembangunan yg terencana & konsisten (jangka panjang) yg skala prioritasnya ad. : <ul style="list-style-type: none"> - Bidang pertanian; - Bidang prasarana; - Bidang industry. 	<p>antara program stabilitasi & rehabilitasi dgn program pemba-ngunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Dibedakannya antara pembangu-nan jangka pendek & jangka panjang dlm pembangunan ekonomi. ❖ Diberlakukannya kebijaksanaan dlm bidang ekonomi yg konsisten disertai dgn penertiban keuangan peme-rintah melalui ke-bijaksanaan APBN yg seimbang. ❖ Kebijakan dlm bidang ekonomi tersebut adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan-peraturan 3 Oktober 1966 b. Peraturan bulan Februari 1967 c. Per-aturan 28 Juli 1967 ❖ Keludupan politik yang relatif stabil. <p>Yang menghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Harga barang-barang ekspor Indonesia di pa-saran Intrnasional menurun. Dan juga merosotnya hasil produksi barang-barang ekspor, menurunnya mutu, kekurangan bahan-bahan baku/penolong serta peralatannya, kesediaan infrastruktur yang menghambat jalannya ekspor. ❖ Aspek administrasi yang belum menunjang. ❖ Mulai dikembang-kannya secara relatif cepat barang-barang sintetis di Negara maju sehingga mengurangi per-mintaan produk Indonesia. ❖ Peranan sektor pertanian yang masih tinggi.
<p>6. Periode 1969/70 - 1973/74</p>	<p>Landasan :</p>	<p>Yang mendukung :</p>
<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Dalam Repelita I sasaran utama yg hendak dicapai adalah meningkat-kar. produksi nasional dgn tetap mempertahankan stabilitasi. ❖ Kebijakan industry dilakukan sebagai industry pengganti barang-barang import (yg perlu diproteksi) yang pd dasarnya merupakan bentuk ekonomi biaya tinggi. ❖ Untuk mengatasi kekurangan dana pemerintah mem-berlakukan ke-bijaksanaan pin-jaman luar negeri dan mengundang modal asing. ❖ Kebijakan ekonomi yg me-nonjol dalam Repelita I adalah : 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ TAP MPRS XXIII/MPRS/1966 <p>Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan GNP dgn tetap menjaga stabi-lisasi ekonomi & pada saat yg bersamaan mening-katkan investasi di sektor yg di priori-taskan (pertanian, pra-sarana, industri). Sasarannya adalah perombakan struktural per- 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tingkat inflasi sudah dapat di kendalikan & disiplin penggu-naan keuangan pemerintah se-makin mantap yg nampak dalam penyusunan & plaksanaan APBN. Dengan perkataan lain perekonomian nasional sudah semakin stabil. ❖ Pemberlakuan ke bijaksanaan baru pemerintah di bidang perda-gangan, ekspor-impor & devisa yg dituangkan dalam Peraturan Peme-rintah RI no. 16 Tahun 1970. ❖ Dialokasikannya dana dalam APBN untuk pemba-ngunan pedesaan pada khususnya & pembangunan daerah pada umumnya. ❖ APBN tetap diper-tahankan seim-bang. ❖ PMDN dan PMA yg semakin mening-kat. ❖ Situasi politik yang semakin stabil. ❖ Repelita memiliki dasar politis yang kuat yaitu berpe-doman pada TAP MPR. ❖ Segi administrasi & kelembagaan yg mu-lai berkembang (berfungsi). <p>Yang menghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Dalam pereko-nomian yang semakin terbuka, Indonesia semakin dipengaruhi oleh

<p>pe-ningkatan laju pembangunan di daerah-daerah ter-tentu, peningkatan kemampuan yang lebih cepat dari golongan ekonomi lemah, pembinaan koperasi, peningkatan produksi pangan & kebutuhan pokok lainnya, transmigrasi, perumahan, perluasan fasilitas pendidikan, perawatan kesehatan & berbagai masalah sosial lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Target pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai 6,5 % ❖ Deregulasi per-bank: 1 Juni 1983 mulai diber-lakuk-an. Semen-tara itu masalah 'de-regulasi' dan 'debirokratisasi' muncul secara menolok. ❖ Mulai 1 Januari 1984 diberlakukan Undang-Undang Pajak yang baru. ❖ Indonesia mulai swasembada beras. ❖ Devaluasi Rupiah tanggal 31 Maret 1983 dari Rp 625,- menjadi Rp 970,- per US \$ 1,- ❖ Perberlakuan Ke-putusan Presiden no. 10/1980 ten-tang sentralisasi pengadaan keper-luan pemerintah. ❖ Inpres nomor 51/ 1984. 	<p>MPR/1978 (GBHN).</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ TAP MPR No. VII/ MPR/1978. ❖ Keputusan Presiden R.I. no. 59/M Tahun 1978. <p>Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan per-tumbuhan ekono-mi sebesar 6,5% dgn berlan-daskan pada Trilogi Pem-bangunan yg meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerataan pem-bangunan & hasil-hasilnya yg menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 2. Pertumbuhan eko-nomi yg cukup tinggi. 3. Stabilitas nasional yg sehat & dinamis. Asas pemerataan tampil sangat tajam dlm Re-pelita III yaitu dgn dituang-kannya 8 jalur pemerataan. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sasaran yang ingin dicapai diikuti oleh ke-bijaksanaan pd bidangnya yang konsisten. ❖ Tingkat inflasi dpt dikendalikan. ❖ Situasi ekonomi pada umumnya sudah lebih baik sehingga memung-kinkan par-tum-buhan, khususnya sektor informal. <p>Yang menghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Gejala ekonomi yg blm juga mereda. ❖ Harga minyak bumi yg mulai mengendor se-hingga sangat me-ngurangi peneri-maan pemerintah.
<p>9. Periode 1984/85 - 1988/89 Repelita IV</p>	<p>Landasan :</p>	<p>Yang mendukung :</p>
<p>Caratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Sasaran partum-buhan dalam Repelita IV adalah 5%. ❖ Dalam bidang politik diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi sosial politik serta organisasi kem-s-yarakatan lainnya demi kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa. ❖ Deregulasi dan de-birokratisasi me-rupakan kebijak-sanaan yang menyolok dalam kurun waktu Repelita IV. ❖ Diumumkan devaluasi pada tanggal 12 September 1986 yang diikuti dgn kebijaksanan-kebijaksanaan lainnya yang menun-jang ke-bijaksanaan devaluasi. ❖ Pemberlakuan Inpres no. 4/1985 tanggal 4 April 1985 mengenai penggunaan SGS sebagai upaya meniadakan eko-nomi biaya tinggi. ❖ Pengaktifan kem-bali penggunaan instru-ment mone-ter berupa fasilitas diskontol ulang, sertifikat Bank Indonesia, surat ber-harga pasar uang. ❖ APBN 1986/1987 volumenya secara absolute menurun dari APBN tahun sebelumnya. ❖ Pembangunan tenaga dan investasi baru 	<p>Pasal 4 ayat (1) UUD 1945</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ TAP MPR no.1/ 1983 mengenai pelimpahan tugas dan wewenang kepada Presiden/ Mandataris MPR dalam rangka penuksesan dan pengamanan pem-bangunan nasio-nal. ❖ Keppres nomor 7/ 1979 tentang Repelita III. ❖ Keppres no.45/M tahun 1983 tentang pembentukan kabinet pembana-ngunan IV. <p>Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Peningkatan per-tumbuhan ekono-mi dengan sasaran diletakkan pada pembangu-nan di bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor per-tanian untuk melanjut-kan usaha-usaha me-mau-tapkan swa-sem-bada pangan dan meningkatkan indus- 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ekspor barang non-migas dpt me-ningkat bahkan pd tahun terakhir Repelita IV telah dapat melampaui nilai eksporminyak bumi. ❖ Penerimaan dlm negeri meningkat khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan 1 Jan 1984. ❖ Dilanjutkan & di-kembangkannya pemberian kredit investasi kecil (KIK), kredit modal kerja permanen (KMKP), dan kredit candak kulak (KCK). ❖ Tetap dipertahan-kannya APBN seimbang, serta inflasi tetap dapat terkendali. ❖ Kegiatan investasi tetap berjalan. <p>Yang menghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Sumber peneri-maan dari minyak bumi menurun sangat tajam.

terutama masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, daerah pedalaman, daerah tertinggal dan daerah pulau terdepan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi harus dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri; serta Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pulau Terdepan dan daerah pasca konflik dan pasca bencana merupakan program yang diarahkan langsung untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif.

Kedua, strategi pembangunan berdimensi kewilayahan. Strategi pembangunan wilayah mempertimbangkan kondisi geografis, ketersediaan sumber daya alam, jaringan infrastruktur, kekuatan sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan yang tidak sama untuk setiap wilayah. Strategi pembangunan wilayah juga memperhitungkan basis daratan dan basis kepulauan atau maritim sebagai satu kesatuan ruang yang tidak terpisahkan. Oleh sebab itu, strategi pembangunan berdimensi kewilayahan memperhatikan tata ruang wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua. Dengan strategi ini, kebijakan pembangunan diarahkan untuk mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah dan membangun keterkaitan antarwilayah yang solid termasuk mempercepat pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, penyediaan air bersih, serta pengembangan jaringan transportasi (darat, laut dan udara) dan jaringan komunikasi untuk memperlancar arus barang dan jasa, penduduk, modal dan informasi antarwilayah.

Ketiga, strategi pembangunan yang mendorong integrasi sosial dan ekonomi antarwilayah secara baik. Dalam hal ini perhatian terhadap pengembangan pulau-pulau besar, kecil dan terdepan harus dilakukan dengan memperhatikan potensi daerah sebagai modal dasar yang dikelola secara terintegrasi dalam kerangka geoekonomi nasional yang solid dan kuat. Dengan kesatuan ekonomi nasional yang kuat untuk lima tahun mendatang, maka posisi tawar Indonesia dalam globalisasi percaturan perekonomian dunia, secara geo-ekonomi berada pada posisi yang lebih kuat, dan lebih berdaya saing. Kebijakan untuk memperkuat integrasi sosial dan ekonomi antarwilayah diarahkan pada pengembangan pusat-pusat produksi dan pusat-

pusat pertumbuhan dan perdagangan di seluruh wilayah. Strategi ini juga membangun keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan, atau *Growth with Equity*. Oleh sebab itu, pemerintah menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH), BLT, Jamkesmas, BOS, dan Kredit Usaha Kecil (KUR). “Strategi demikian juga merupakan koreksi atas kebijakan pembangunan terdahulu, yang dikenal dengan *trickle down effect*,”

Keenam, strategi pengembangan kualitas manusia. Orientasi pembangunan adalah peningkatan kualitas manusia (*the quality life of the people*) sebagai bagian dari penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, sanitasi dan air bersih, perumahan, sumber daya alam dan lingkungan, dan jaminan keamanan. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada peningkatan akses dan mutu layanan dasar termasuk pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, sanitasi dan air bersih, perumahan, sumber daya alam dan lingkungan, dan jaminan keamanan terutama bagi masyarakat yang berada di daerah perdesaan, kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar dan daerah pasca konflik dan pasca bencana. Dengan meningkatnya kualitas manusia, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat dan membaik secara merata di seluruh wilayah.

Pengembangan Pulau-pulau Besar

Kebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Pembangunan wilayah Sumatera diarahkan untuk menjadi pusat produksi dan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan; lumbung energi nasional, pusat perdagangan dan pariwisata sehingga wilayah Sumatera menjadi salah satu wilayah utama dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Pembangunan wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk tetap mempertahankan fungsi lumbung pangan nasional, mengembangkan industri pengolahan secara terkendali dan memperkuat interaksi perdagangan, serta

kelautan Papua-Sulawesi. Dari sepuluh wilayah pengembangan kelautan tersebut, dengan memperhatikan fungsi strategisnya dalam penguatan keterkaitan antarwilayah maka dipilih lima wilayah prioritas pengembangan untuk periode 2010-2014 yaitu Wilayah Pengembangan Kelautan Sumatera, Malaka, Jawa, Makassar-Buton, dan Banda-Maluku.

Pengembangan kawasan strategis, daerah tertinggal, perbatasan, pembangunan perkotaan, perdesaan, pertanian, tata ruang.

Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan wilayah, kebijakan pembangunan wilayah diarahkan untuk: (1) pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, (2) pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan rawan bencana, (3) pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan, dan (4) penataan dan pengelolaan pertanahan. Strategi yang diterapkan adalah:

- 1) Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan daerah-daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis dengan mengutamakan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi.
- 2) Meningkatkan pengembangan daerah-daerah tertinggal dan terpencil agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain.
- 3) Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengutamakan kebijakan pembangunan yang berorientasi ke luar sehingga menjadi pintu gerbang dalam hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.
- 4) Menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional dengan tujuan mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali seperti yang terjadi di wilayah pantani utara Jawa, serta mengendalikan arus migrasi masuk langsung dari desa ke

Tugas pokok dan fungsi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) sebagaimana diamanatkan oleh UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Perpres No.47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dan Perpres No.24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, adalah menjalankan: Perumusan dan penerapan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal; Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab KPDT; dan Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KPDT.

Saat ini ada sebanyak 349 kabupaten dan 91 kota yang termasuk sebagai daerah tertinggal, dimana sebanyak 39 kabupaten/kota diantaranya berada di wilayah perbatasan. Dari 39 kabupaten/kota wilayah perbatasan tersebut, sebanyak 38 kabupaten/kota memiliki 60 pulau terluar. KPDT menetapkan sebanyak 183 kabupaten/kota daerah tertinggal sebagai fokus lokasi, dimana sebanyak 27 kabupaten/kota diantaranya terletak di kawasan perbatasan, yaitu 15 kabupaten/kota di kawasan perbatasan darat dan 12 kabupaten/kota di kawasan perbatasan laut yang memiliki 56 pulau terluar.

Seratus delapan puluh tiga (183) kabupaten/kota tertinggal yang menjadi fokus lokasi KPDT tersebut tersebar di 7 wilayah, yaitu: sebanyak 46 kabupaten/kota (25%) berada di wilayah Sumatera; 9 kabupaten/kota (5%) di wilayah Jawa dan Bali; 16 kabupaten/kota (9%) di wilayah Kalimantan; 34 kabupaten/kota (19%) di wilayah Sulawesi; 28 kabupaten/kota (15%) di wilayah Nusa Tenggara; 15 kabupaten/kota (8%) di wilayah Maluku; dan 33 kabupaten/kota (19%) di wilayah Papua. Sebanyak 128 kabupaten/kota atau sekitar 70% dari 183 kabupaten/kota tertinggal yang menjadi fokus lokasi KPDT berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI), sedangkan 55 kabupaten/kota (30%) berada di Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Pengertian kawasan perbatasan negara menurut UU 26/2007 dan PP 26/2008 adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas. Sedangkan menurut UU 43/2008, kawasan perbatasan negara adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam batas wilayah Indonesia dengan negara

Dari 70 kabupaten/kota tertinggal yang ada di perbatasan, sebanyak 14 kabupaten/kota diantaranya, yaitu kabupaten/kota Timur Tengah Utara, Rote Ndao, Sambas, Raja Ampat, Natuna, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Kutai Barat, Malinau, Nunukan, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, dan Keerom diprioritaskan untuk di entaskan dengan tingkat intervensi pada 6 (enam) kriteria utama, yaitu perekonomian, SDM, infrastruktur, fiskal daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Strategi pembangunan kawasan perbatasan dilakukan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada sentra-sentra kawasan perbatasan yang potensial melalui basis ekonomi kerakyatan dengan tersedianya infrastruktur yang memadai; Menciptakan stabilitas politik yang kondusif dan konstruktif guna mendukung pelaksanaan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan; Meletakkan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan utama dengan meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat di kawasan perbatasan secara nyata; dan Meningkatkan kinerja manajemen pembangunan melalui kualitas aparatur pemerintah, sehingga mampu menjadi fasilitator pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan.

Dalam rangka mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, maka perlu ditetapkan Otorita Kawasan Perbatasan dan pintu masuk (gate) ke negara tetangga, yang secara khusus diatur tersendiri sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah. Kebijakan pembangunan daerah perbatasan dimaksudkan untuk mendorong kebijakan afirmatif tentang pembiayaan dan pengembangan fiskal daerah tertinggal, mendorong Tata Kelola sumber daya alam daerah tertinggal berbasis komoditas unggulan, mendorong dan meningkatkan kualitas SDM melalui program penguatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, merumuskan arah dan kebijakan pembangunan pusat dan daerah, serta proaktif melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder pembangunan daerah tertinggal.

KPDT merekomendasikan untuk mengatasi keteringgalan kabupaten/kota di perbatasan dengan memfokuskan pada pengembangan ekonomi wilayah kabupaten/kota untuk dapat menjadi produsen hulu/hilir bagi negara tetangga, dan mendorong optimalisasi potensi-potensi kabupaten/kota agar memiliki nilai tambah menjadi market negara tetangga, misalnya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan lain-lainnya.

Rodan. Pada 1943, Rosenstein-Rodan menulis artikel tentang "*Problems of Industrialisation of Eastern and South-Eastern Europe*". Dalam teori yang belakangan dikenal dengan *Big Push Model*, ditekankan perlunya rencana dan program aksi dengan investasi skala besar untuk mempercepat industrialisasi di negara-negara Eropa Timur dan Tenggara.

Dalam konteks daerah tertinggal, "daya dorong yang besar" bisa diartikan modal dan infrastruktur. Aksesibilitas modal dan keberpihakannya kepada daerah tertinggal merupakan langkah strategis. Pengembangan infrastruktur yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat-pusat bisnis, pasar, dan jejaring internasional tampaknya perlu menjadi prioritas bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta.

Berdasarkan perhitungan awal KPDT total kebutuhan investasi di kabupaten tertinggal Tahun 2010-2014 mencapai sekitar Rp. 716 Triliun. Angka ini barangkali mendekati pemenuhan kebutuhan *Big Push Model*. Hanya saja upaya pemenuhan seluruh kebutuhan daerah tertinggal untuk keluar dari ketertinggalan hanyalah mimpi jika mengandalkan anggaran KPDT semata, karena alokasi anggaran APBN yang dikelola KPDT hanya sekitar Rp. 1 Triliun per tahun.

Besarnya dana yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan percepatan pembangunan daerah tertinggal perlu diupayakan dengan berbagai cara (yang syah) diantaranya melalui: (1) pemberian insentif kepada investor agar tertarik berinvestasi di daerah tertinggal, dan (2) *mainstreaming* alokasi anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk fokus pada penyelesaian ketertinggalan daerah.

Semua gambaran permasalahan dan kebutuhan daerah tertinggal di atas merupakan sebuah tantangan. Harapannya sekarang terletak pada pembuktian komitmen pemerintah. Keinginan mengentaskan ketertinggalan daerah hendaknya tidak berhenti pada dokumen perencanaan semata, apalagi sekedar basa-basi.

Strategi Pembangunan Daerah di Indonesia

Disamping pembahasan strategi pembangunan di atas perlu dibahas pula strategi pembangun daerah. Dalam buku ini akan dibahas strategi

transportasi kota ; Penyediaan sarana dan prasarana transportasi publik ; Penyediaan Sistem informasi yang berbasis TI.

Misi ke-3 :

Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) investasi serta menciptakan keterpaduan antara pengusaha kecil, menengah dengan pengusaha besar yang didukung oleh iklim yang kondusif, dengan tujuan akhir yaitu : (a) Meningkatnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), Koperasi, dan Investasi; (b) Meningkatnya ketahanan pangan; dan (c) Meningkatnya perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, maka strategi pembangunan yang diletakkan adalah : Peningkatan penyediaan jaringan pendukung untuk UMKM, koperasi dan investasi; Pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan; Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja.

Misi ke-4 :

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin melalui fasilitasi kebutuhan dasar , penataan dan pembinaan PKL serta usaha sektor informal lainnya, dengan tujuan akhir yaitu (a) Meningkatnya pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial; (b) Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga miskin; dan (c) Terwujudnya penataan dan pengelolaan usaha sektor informal secara konstruktif dan modern, maka strategi pembangunan yang diletakkan adalah : Pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial ; Penataan dan pembinaan PKL ;

Misi ke-5 :

Mewujudkan penataan lingkungan akan dibentuk yaitu : terwujudnya lingkungan kota yang bersih, hijau dan nyaman bagi warga kota, maka strategi pembangunan yang diletakkan adalah : Pembangunan kota berwawasan lingkungan; Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau; Peningkatan sistem pengendalian banjir; Peningkatan pengelolaan sampah; Peningkatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; Peningkatan kualitas permukiman.

Strategi pembangunan daerah di Kabupaten Karo, Strategi pembangunan adalah merupakan suatu cara untuk mencapai Visi dan Misi yang rumuskan dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatkan kinerja. Kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi (pemerintah) menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah. Faktor – faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi pemerintah secara sinergis dan efisien. Untuk merumuskan strategi maka dibutuhkan analisis lingkungan strategis.

Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal Analisis internal dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari berbagai aspek yang ada di Kabupaten Karo. Aspek-aspek internal di Pemerintah Kabupaten Karo antara lain terdiri dari aspek: Kelembagaan, manajemen, SDM, SDA dan sumber daya lainnya.

Analisis keadaan eksternal perlu dilakukan untuk mendapatkan (mengidentifikasi) sebagai aspek diluar Kabupaten Karo yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Karo. Dengan melakukan analisis keadaan eksternal akan diketahui peluang dan ancaman (tantangan) yang dapat dimanfaatkan dan akan berpengaruh dalam mencapai kinerja yang optimal.

Analisis internal dilaksanakan dengan melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan Kabupaten Karo sebagai berikut :

Kekuatan (Strength):

1. Kabupaten Karo memiliki daerah datar dengan ketinggian diatas 1000 meter diatas permukaan laut dan tanahnya subur;
2. Kabupaten Karo memiliki udara pegunungan yang sejuk dan segar;
3. Kabupaten Karo dekat dengan ibukota Propinsi Sumatera Utara, Medan sebagai pintu gerbang internasional;
4. Kabupaten Karo kondusif dan aman;
5. Tingginya motivasi masyarakat karo dalam meningkatkan kualitas pendidikan anggota keluarga;
6. Adanya tersedia akses jaringan informasi dan komunikasi baik Nasional maupun Internasional;

- keluarga berencana;
14. SDM petani secara umum masih rendah;
 15. Jumlah pegawai penyuluh pertanian (PPL) masih kurang dan kemampuan mereka juga masih kurang memadai/ kurang;
 16. Kualitas tenaga pengajar sekolah dasar dan menengah relatif rendah, dan distribusi guru tidak merata;
 17. Pengelolaan dan pengembangan objek-objek wisata kurang memadai;
 18. Disiplin dan kepedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup dan menjaga kelestarian sumberdaya alam seperti air, lahan dan hutan rendah; dan
 19. Tanah/lahan belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai aset pembangunan karena status kepemilikan masih banyak yang belum tersertifikasi.

Selanjutnya, analisis lingkungan eksternal dilakukan dengan mengidentifikasi peluang dan ancaman dari luar. Peluang dan ancaman dimaksud adalah seperti diuraikan berikut ini.

Peluang (Opportunity):

1. Produk pertanian dataran tinggi memiliki peluang pasar yang tinggi baik ditingkat nasional maupun internasional (AFTA, APEC, ASEAN) karena kondisi alam dataran tinggi seperti tanah karo sangat terbatas di Indonesia dan malah di dunia;
2. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan dan pemerintahan;
3. Perundang-undangan membuka peluang untuk membangun kerjasama dengan pihak swasta dan dunia luar;
4. Pariwisata Karo bila sudah layak dijual maka akan mempunyai peluang pasar yang besar ke dunia internasional;
5. Kebutuhan daging sapi dan susu di Sumatera Utara sangat kurang dan harus dipasok dari luar propinsi Sumatera Utara (Lampung). Kabupaten Karo cocok dan potensial untuk usaha peternakan dan peluang ini dapat ditangkap oleh Kabupaten Karo;
6. Tersedia teknologi dan peralatan pertanian dan peternakan dipasar untuk pengembangan pertanian dan peternakan karo;

- manajemen pertanian secara aktif dan terus-menerus; dan
6. Pemanasan global (global warming) mengalami akselerasi yang tinggi dan telah merubah pola iklim secara signifikan. Kondisi ini dapat menimbulkan bencana alam berupa kekeringan dan tanah longsor di kabupaten Karo. Kedua kejadian ini memiliki potensi mengakibatkan terjadinya peningkatan keluarga miskin di Kabupaten Karo.

Isu-isu Strategis

Mengidentifikasi isu-isu strategis adalah merupakan jantung dalam proses perencanaan strategis, karena isu strategis adalah merupakan pilihan kebijakan pokok yang mempengaruhi mandat, misi, nilai organisasi, tingkat dan perpaduan output atau jasa, pemakai layanan, biaya, keuangan dan organisasi atau manajemen. Cara pilihan ini dibentuk bisa memiliki pengaruh yang amat kuat pada keputusan yang mengidentifikasi bagaimana organisasi Pemerintah Kabupaten Karo; apa yang dikerjakannya, dan mengapa organisasi mengerjakannya. Ada dua hasil pokok yang harus dicari dari langkah identifikasi isu-isu strategis ini, yang pertama ialah daftar isu strategis dan yang kedua ialah penyusunan isu-isu strategis dalam urutan prioritas, logis atau temporal.

Isu-isu strategis disusun dalam 4 kelompok isu yakni: (1) *keunggulan komperatif (comperative advantage)*; (2) *Mobilisasi (mobilization)*; (3) *investasi/divestasi (investment/ divestment)*; dan (4) *bertahan (status quo)*. Isu-isu yang masuk kelompok *keunggulan komperatif* ialah isu yang muncul akibat persilangan antara kekuatan internal dengan peluang eksternal; kemudian isu yang masuk kelompok *mobilisasi* ialah isu yang muncul akibat persilangan antara kekuatan internal dengan ancaman eksternal; selanjutnya isu yang masuk kelompok *investasi/divestasi* ialah isu yang muncul akibat persilangan antara kelemahan internal dengan peluang eksternal; dan isu pada kelompok *bertahan* muncul akibat persilangan antara kelemahan internal dengan ancaman eksternal.

Berdasarkan pencermatan terhadap hal-hal tersebut diatas maka isu-isu atau langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Karo periode Tahun 2006-2010 adalah seperti diuraikan dibawah ini.

Langkah Strategis Mobilisasi

Langkah strategis yang perlu dilakukan dalam hal ini ialah bagaimana memobilisasi kekuatan untuk mengatasi ancaman. Ancaman yang potensial dibidang ekonomi ialah persaingan bebas dengan daerah dan atau negara lain, baik dalam hal produk pertanian, teknologi dan manajemen. Dengan adanya keinginan kuat masyarakat karo untuk meningkatkan ilmu pengetahuan maka langkah strategis yang perlu dilakukan ialah: **“Membangun kemampuan enterpreniurship masyarakat karo sehingga terbentuk ekonomi kerakyatan yang kuat dan tangguh”** (*Agenda Kedua*).

Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mendukung agenda kedua diatas ialah:

1. Pembangunan industri kecil dan menengah yang memiliki daya saing tinggi;
2. Pembangunan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
3. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
4. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Peningkatan pembangunan perdesaan;
6. Percepatan pembangunan dan penataan ruang wilayah;
7. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial.

Langkah Strategis Investasi/Divestasi

Langkah strategis yang perlu dilakukan dalam hal ini ialah mencari apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan kelemahan untuk meraih peluang. Kelemahan-kelemahan yang menonjol di Kabupaten Karo ialah kualitas, etos dan motivasi daripada SDM kabupaten karo sedang terpuruk, baik SDM masyarakat maupun aparat pemerintahan. Untuk meraih peluang-peluang yang tersedia maka diperlukan pembangunan manusia seutuhnya di kabupaten karo. Untuk itu maka langkah strategis yang perlu dilakukan ialah: **“Pembangunan Sumber Daya Manusia”** (*Agenda Ketiga*;) dan **“Pembangunan Infrastruktur”** (*Agenda Keempat*)

8. Pembangunan silo-silo penampungan dan pengeringan hasil produksi jagung; dan
9. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang peternakan di kabupaten karo.

Langkah Strategis Untuk Bertahan (Status Quo)

Langkah strategis yang perlu dilakukan dalam hal ini ialah bagaimana caranya bertahan agar keadaan tidak menjadi lebih buruk atau kelemahan apa yang perlu diperbaiki agar dapat bertahan dari ancaman dari luar. Ancaman-ancaman dari luar sangat banyak termasuk infiltrasi budaya dan ideologi yang dapat merusak tatanan kekerabatan masyarakat karo dimasa mendatang. Sementara itu dari sisi lain motivasi dan etos kerja masyarakat menurun sehingga terbuka kemungkinan jumlah penduduk miskin bertambah dan rawan sebagai media tumbuhnya pengaruh luar yang tidak menguntungkan. Untuk itu maka langkah strategis yang perlu dilakukan ialah: **“Peningkatan Kerukunan dan Kesejahteraan Masyarakat” (Agenda Kelima).**

Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mendukung agenda kelima diatas ialah:

1. Meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
2. Melestarikan nilai-nilai budaya Karo tanpa menutup diri terhadap budaya luar yang bersifat positif;
3. Meningkatkan peran serta tokoh agama dan rohaniawan dalam pembangunan kemasyarakatan;
4. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat berdasarkan nilai-nilai demokrasi; dan
5. Penegakan supremasi hukum.

Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan (*Critical Success Factor*)

Faktor-faktor kunci/penentu atau *Critical success factors* keberhasilan meliputi beberapa hal yang harus dijalankan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Karo. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor strategis dari seluruh organisasi pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karo antara lain sebagai berikut :

Lampiran 1 Perbandingan Antara Teori Modernisasi, Teori Dependensi, dan Teori Sistem Dunia

Teori	Modernisasi		Dependensi		Sistem Dunia (Sist Ek. Kapitalis Dunia)
	Klasik	Baru	Klasik	Baru	
1	2	3	4	5	6
Pemikir/ Teoritisi	Harrod-Domar WW Rostow David Mc Clelland Alex Inkeles	Michael R. Dove Winston Davis	Andre Gunder Frank Theotonio D. Santos	Fernando H. Cardoso Thomas B. Gold	Immanuel Wallerstein
Fokus Perhatian	Pembangunan di Dunia Ketiga	Pembangunan di Dunia Ketiga	Pembangunan di Dunia Ketiga	Pembangunan di Dunia Ketiga	Pembangu-nan di Dunia Ketiga
Tingkat Analisis	Nasional	Nasional	Nasional	Nasional	Sistem Dunia
Metode Kegiatan	Abstrak & Konstruksi Tipologi	Studi Kasus dan Analisis Sejarah	Abstrak, Perumusan Model	Historis Struktural Situasi Konkrit Ketergan- tungan	Dinamika Sejarah Sistem Dunia : Kecenderungan Sekuler
Warisan Pemikiran Teoritis	Teori Evolusi & Fungsional	Teori Evolusi & Fungsional	Neo Marxis Program KEPBRAL	Neo Marxis Program F'EPBBAL	Neo Marxis Ajaran Anales Perancis
Konsep Pokok/ Struktur Teori	Tradisional & Modern	Tradisional & Modern	Pusat & Pinggiran Ketergantungan	Pusat & Pinggiran Ketergantungan	Tri Kutub : Pusat, Semi Pinggiran & Pinggiran
Faktor Utama Pemb/ Keterbela-kangan	Faktor Internal : Nilai Budaya & Pranata Sosial	Faktor Internal	Faktor Eksternal :Kolonialisme & Ketidak Seimbangan nilai tukar	Faktor Internal : Negara & Konflik Kelas	Faktor Eksternal & Internal
Hubungan Pemb & Ketergantungan	Berkaitan	Berkaitan	Bertolak Belakang	Koeksistensi: Pemb. yg. Bergantung	Kemungki nan Mobili-tas Naik Turun
1	2	3	4	5	6
Hubungan Interna- sional	Sangat Menguntung kan	Sangat Menguntung kan	Merugikan Negara Dunia Ketiga	Tidak Selalu Merugikan Negara Dunia Ketiga	Sangat Diperlukan
Implikasi Kebijaksanaan	Modernisasi memberikan manfaat positif Lebih mendekatkan. dng negara maju	Modernisasi memberikan manfaat positif Lebih mendekatkan dng negara maju	Mengurangi keterkaitan dng negara pusat Revolusi Sosial	Mengurangi keterkaitan dengan negara pusat Revolusi Sosial	Perlunya perjuangan kelas berskala global untuk melakukan transportasi sistem ekonomi kapitalis dunia

Daftar Pustaka

- Abraham, M. Francis, 1991, *Modernisasi di Dunia Ketiga, Suatu Teori Umum Pembangunan*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Ades, Leslie J., 1992, *Managing Mavericks*, New York, McGraw-Hill, Inc.
- Amin, Samir, 1970, *Neo Colonialism in West Africa*, Penguin African Library.
- Abimanyu, Anggito, 1995, *Liberalisasi Perdagangan dan Biaya Lingkungan*, dalam Soetrisno, Loekman dan Umayu, Faraz (eds), *Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan*, P.T. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Appelbaun, Richard, P, 1970, *Theories of Social Change*. Chicago, Markham Publishing Company.
- Arief, Saiful, 2000, *Menolak Pembangunanisme*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Arief, Sritua dan Sasono, Adi, 1981, *Indonesia: Ketergantungan dan Keterbelakangan*, Jakarta, Lembaga Studi Pembangunan.
- Baran, Paul and E.J. Hobsbawn, 1983, *The Stage Economic Growth* dalam Charles K. Wilber (ed.), *The Political Economy of Development and Under Development*, Random House, New York.
- Bear, Werner and Maloney, William, 1997, *Neoliberalism and Income Distribution in Latin America*, dalam buletin World Development volume 25 No. 3, March 1997.
- Beling & Totten, 1980, *Modernisasi, Masalah Model Pembangunan*, Jakarta, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.

- Eaton, Yosep.W,1972, *Guideline to Development Theory Formation*, Bavery Hills, Sage Publication.
- Effendi, Sofian, dkk, 1996, *Membangun Martabat Manusia: Peranan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Esman, Milton J. and Uphoff, NT , 1982, *Local Organization and Rural Development*, RDC-CIS, Cornell University Press.
- Esmara, Hendra, 1986, *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta.
- Eugene, A.Havens, 1980, *Methodological Issues In The Study of Development*, Wisconsin, University of Madison.
- Evers, Hans Dieter, 1973, *Modernization in South East Asia*, London, Oxford University Press.
- Fakih, Mansoer, 2001, *Sesat Pikir, Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Freire, Paulo, 1973, *Education for Critical Conciousness*, New York, A Continuum Book, The Seabury Press.
- Friedmann, J., 1992, *Empowerment: The Politics of Alternatif Development*, Oxford, USA, Blackwell.
- Gant, George F., 1979, *Development Administration: Concepts, Goals, Method*, The University of Wisconsin Press.
- Giddens, Anthony, 2000 (Cet. Ketiga), *Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gilbert, Alan & Gugler, Josef, 1996, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*, PT. Tiara Wacana Yogya.
- Goldsmith, Edward, *Development as Colonialism*.
- Goulet, Denis, 1973, *The Cruel Choice: A New Concept in the Theory of Development*, New York, Atheneum.
- Gore, Al, 1995, *Common Sense Government: Works Better and Cost Less*, National Performance Review, Third Report.
- Gramsci, Antonio, 1999, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga* (Muhadi Sugiono, editor), Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hettne, Bjorn, 2001, *Teori Pembangunan Dan Tiga Dunia*, Jakarta,

- Oakley, Peter and David Marsden, 1985, *Approach To Participation in Rural Development*, International Labour Office, Geneva.
- Owens, Edgar dan Shaw, Robert, 1983, *Pembangunan Ditinjau Kembali*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press .
- Patria, Nezar dan Arief, Andi, 1999, *Gramsci Antonio, Negara dan Hegemoni*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ponsioen, J.A., 1968, *National Development*, Mouton, The Hague.
- Popper, Karl, R, 1985, *Gagalnya Historisisme*, Jakarta, LP3ES.
- Preston, PW, 1996, *Development Theory An Introduction*, Cambridge, Massachusetts, Blackwell Publishers.
- Pedoman Pembangunan Masyarakat Desa, Ditjen PMD Depdagri, 2004.
- Reddin, William J., 1970, *Managerial Efficiency*, Tokyo: McGraw-Hill – Kogakusha Ltd.
- Riggs, Fred W., 1964, *Administration in Developing Countries*, Boston, Houghton Mifflin. Co.
- Rostow, W.W, 1960, *The Stages of Economic Growth: A Non Communist Manifesto*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Roxborough, Ian, 1979, *Theories of Underdevelopment*, London, Basing Store.
- Salladien, Alternatif Model Pembangunan Berbasis Sumberdaya Manusia Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan di Era Global, *Makalah dalam pertemuan IGI VI*, 2004.
- Sanit, Arbi, 1987, *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Jakarta, Rajawali .
- Schoorl, J.W, 1980, *Modernisasi*, Soekadijo (penterjemah), Jakarta, Gramedia.
- Scott C. James, 1994, *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan subsistensi di Asia Tenggara*, Cetakan keempat, Jakarta, LP3ES.
- Sjahrir, 1988, *Kebijaksanaan Negara, Konsistensi dan Implementasi*, LP3ES, Jakarta.
- Soetomo, 1995, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Jakarta, Pustaka Jaya .
- Soetrisno, Lukman, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta,

- Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaja, 1988, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Cetakan keenam, Jakarta, Haji Mas Agung.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1987, *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Yogyakarta, Tiara Wacana
- Tjokrowinoto, Mubyarto, *Strategi Pembangunan*, UGM Press, 1995.
- Todaro, Michael , 1977, *Economic Development in the Third World*, London, Longmans.
- , 1983, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Aminuddin dan Mursid (penterjemah), Jakarta, Ghalia Indonesia
- Todaro, Michael P., 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, edisi ketujuh, PT Gelora Aksara Pratama.
- Turner, Bryan, 2000, *Teori-Teori Sosiologi: Modernitas-Postmodernitas*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar .
- Uphoff, Norman T., 1979, *Feasibility and Application of Rural Development Participation*, Cornell University, USA.

- (Wasana Praja)
- E_Government (Nindya Praja)
- Perencanaan Kota dan Wilayah (Nindya Praja)
- Manajemen Organisasi Pembelajaran (Wasana Praja)
- 2007/2008 :
 - Manajemen Proyek (Madya Praja)
 - SIM Pembangunan (Nindya Praja)
 - Teori-teori Pembangunan (Madya Praja)
 - Sistem Dinamik (Nindya Praja)

Penelitian/Buku

- 2009 : Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat, Penelitian Mandiri Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- 2008 : Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, Penelitian Mandiri Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- 2007 : Model Reward dan Punishment Kepada Seluruh PNS di Lingkungan IPDN, Penelitian Mandiri Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- 2000 : Evaluasi Kinerja IIP Sebagai Dasar Pembentukan Organisasi yang Inovatif, Penelitian Mandiri Institut Ilmu Pemerintahan (IIP).

Tulisan di Jurnal Ilmiah :

- 2010 : Improving Local Development Performance in Selected Provinces

- 2008 : Tinjauan Terhadap Penelitian-penelitian Manajemen Rantai Pasok (Journal of Logistics and Supply Chain Management Volume 1, Number 3, October 2008, Department of Industrial Engineering, University of Surabaya and Asosiasi Logistik Indonesia).

Investasi Dalam Konteks Otonomi Daerah (Jurnal Widya Praja Edisi 2 Thn. 2008, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- 2007 : Determinan Daya Tarik Investasi di Maluku Utara (Jurnal Widya Praja Edisi 2 Thn. 2007, IPDN).

- Teori-teori Pembangunan (Madya Praja)
- Sistem Dinamik (Nindya Praja)

Penelitian/Buku

- 2010 : - Penyusunan Naskah Akademik Kawasan Perkotaan Jatinangor (Penelitian Kelompok)
 - Teori Pembangunan (Modul)
 - Pembangunan Daerah (Modul)
 - Ilmu Kewilayahan (Modul)
- 2009 : Studi Kelayakan Kawasan Perkotaan Jatinangor (Penelitian Kelompok).
- 2008 : Kebijakan Penerapan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung (Penelitian Kelompok – IPDN).
- 2007 : Laporan Akhir Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Provinsi Bali (Penelitian Kelompok).
 - Langkah Praktis Menguasai Aplikasi Ms`Powerpoint” (Modul).
 - Pengenalan Internet (Modul).
- 2006 : Panduan Pelatihan E_Government (Modul).
 - : Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten OKU Selatan (Penelitian Kelompok).
 - Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Dengan Pendekatan E-Government.
 - Pemanfaatan Teknologi Informasi

Reformasi Jatinangor Jurnal Pemerintah
Daerah VISIONER.

• 2004

: Disparitas/Kesenjangan Wilayah Banten
Pasca Otonomi Daerah Jurnal Pemerintah
Daerah VISIONER.